



**DINAMIKA KEBIJAKAN TEHADAP NELAYAN
TINJAUAN HISTORIS
PADA NELAYAN PANTAI UTARA JAWA,
1900-2000**

PIDATO PENGUKUHAN

Disajikan pada Upacara
Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah
pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro
Semarang, 17 Maret 2007

Oleh
Sutejo Kuwat Widodo

**DINAMIKA KEBIJAKAN TEHADAP NELAYAN
TINJAUAN HISTORIS PADA NELAYAN PANTAI UTARA
JAWA, 1900-2000**

Sutejo Kuwat Widodo

PIDATO PENGUKUHAN

Disajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah
pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro
Semarang, 17 Maret 2007

Cetakan pertama, 2007
Diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang

ISBN:

Yang saya hormati,

Bapak Rektor/Ketua Senat,
Sekretaris Senat dan Para anggota Senat Universitas Diponegoro,
Para anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro,
Para pejabat negara, sipil, militer,
Para Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga,
Direktur Program Pascasarjana,
Segenap sivitas akademika Universitas Diponegoro,
Para tamu Undangan,
Serta para mahasiswa yang saya cintai.

Assalammu'alaikum warahmatullaahi wabarokatuh

Salam sejahtera dan selamat pagi

Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan Rachmat dan Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini saya berkesempatan menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar di hadapan rapat senat terbuka Universitas Diponegoro dan hadirin yang saya hormati. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri, sekaligus ikut meresmikan, upacara pengukuhan ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan hasil dari penelusuran terhadap peristiwa yang telah menjadi sejarah yang saya anggap menarik. Pulau Jawa yang dikelilingi oleh wilayah perairan dengan sumber kekayaan ikannya, di masa lampau penduduknya dalam memenuhi kebutuhan ikan, mendatangkan ikan hasil tangkapan nelayan dari pulau lain, bahkan mengimpor. Tujuannya adalah untuk mengungkap kebijakan tentang nelayan di masa lampau, dan juga belajar dari ketergantungan menuju keswasembadaan dalam pemenuhan kebutuhan ikan.

Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul:

**DINAMIKA KEBIJAKAN TEHADAP NELAYAN
TINJAUAN HISTORIS TERHADAP NELAYAN
PANTAI UTARA JAWA, 1900-2000**

“Tak kan ada ikan di meja makan, tanpa ada jerih payah nelayan.....”

Itulah sepenggal bait nyanyian yang pernah populer lewat tayangan Televisi Republik Indonesia. Suatu tayangan yang sedemikian sering kala itu, pada stasiun TV satu-satunya; merupakan upaya berskala luas untuk mengingatkan kepada kelompok sosial lain akan peran nelayan yang telah memberikan andil yang tidak kecil dalam pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Sudah sewajarnya pekerjaan sebagai nelayan juga memperoleh tempat yang terhormat dalam pergaulan sosial-kemasyarakatan. Lebih lanjut, dalam bait nyanyian tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa di meja makan kecuali tersaji ikan, juga ada sajian pokok; yaitu nasi, keduanya sebagai pemenuhan manusia akan kebutuhan unsur nabati dan hewani.

Beras dan ikan mempunyai sejarah yang berseberangan.

Walau nasi dan ikan di meja makan dapat bersanding saling melengkapi, tetapi kedua komoditas tersebut mempunyai sejarah yang berbeda, bahkan cenderung mempunyai kisah perjalanan yang telah mengambil jalan berseberangan. Terhadap nasi yang asalnya dari padi atau beras tersebut, Indonesia sebagai negara agraris, dan khususnya pulau Jawa dalam sejarahnya pernah dikenal sebagai lumbung padi (Hall: 1955: 236). Dalam perdagangan antarpulau, beras dari Jawa menjadi komoditas perdagangan yang dipertukarkan dengan komoditas lain, di antaranya ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku, barang kelontong dari India, atau tembikar dari Cina. Dalam perkembangan kemudian Indonesia pernah mengimpor beras, kemudian mampu berswasembada untuk waktu beberapa saat pada era pemerintahan Soeharto, dan pada waktu krisis multidimensi di akhir abad XX kembali menjadi pengimpor beras. Bahkan persoalan impor beras pada akhir-akhir ini telah berkembang menjadi persoalan politik yang menghiasi media massa. Di sisi lain, pulau Jawa yang dikelilingi oleh wilayah perairan berupa laut, di masa lalu penduduknya dalam memenuhi kebutuhan ikan, utamanya ikan laut, sebagian besar dilakukan dengan cara mendatangkan ikan hasil tangkapan nelayan dari wilayah lain atau impor, dalam bentuk ikan asin dan ikan kering (Widodo, dalam Edy Sedyowati dan Susanto Zuhdi, 2001). Peristiwa ini berlangsung sejak pemerintah kolonial Belanda sampai dengan dekade kemerdekaan Indonesia tahun 1960-an (periksa grafik).

Walau pulau Jawa dikelilingi laut tetapi di masa lampau dalam memenuhi kebutuhan ikan dilakukan dengan impor

Mungkin masih ada yang ingat, bahwa ikan asin, ikan kering, dan terasi yang berkualitas baik berasal dari Bagansiapi-api. Peristiwa yang telah berlangsung dan telah menjadi sejarah tersebut merupakan suatu ironi, bahwa pulau Jawa dengan lingkungan perairan yang mengelilingi yang sudah tentu mempunyai sumber kekayaan ikan, akan tetapi pemenuhan kebutuhan ikan laut untuk penduduknya harus didatangkan dari daerah lain. Ketergantungan berupa impor ikan di Jawa, mulai berkurang setelah adanya politik **Berdikari** atau **Berdiri di atas Kaki Sendiri** yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan budaya, serta dipicu pula, oleh kondisi hubungan yang memburuk dengan Malaysia, yakni konfrontasi (Widodo, 2006). Dalam bidang ekonomi, **Berdikari** berarti pemenuhan kebutuhan berdasarkan pada kemampuan sendiri. Untuk itu dalam hal pemenuhan kebutuhan ikan harus dipenuhi sendiri dengan melakukan larangan terhadap impor ikan. (*Gemah Ripah*, 1968. No. 1-2. Th VI: 15). Sejak ditetapkan kebijakan tersebut, hasil tangkapan nelayan Jawa terus meningkat, dan bahkan kemudian mampu mengeksportnya (Djuliati, 1999) Perkembangan yang kemudian adalah pada saat krisis multidimensi, sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang tidak terlenda oleh badai krisis, bahkan cenderung menuai keuntungan (Widodo, 2005). Masa kemakmuran nelayan di tengah kelesuan bidang usaha yang lain tidak berlangsung lama. Sejalan dengan bergulirnya reformasi, kemudian dengan lahirnya Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi menjadi tuntutan dari wilayah daerah tingkat II, belum lagi dengan adanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, persoalan wilayah tangkapan ikan menjadi semacam hak yang dimaknai oleh nelayan setempat sebagai kekuasaannya (*Suara Merdeka*, 25-1-06: 26).

Nelayan memasuki era baru, yang pada tahun 1980-an baru mengalami konflik vertikal (Emmerson, 1977), pada akhir abad XX meluas mengalami konflik vertikal-horisontal. Sepertinya, jika mungkin laut yang merupakan hak milik bersama (*common property*) yang sifatnya terbuka tersebut akan dikapling-kapling atas dasar kekuasaan daerah. Belum reda badai konflik yang menghantam antar nelayan di laut, nelayan didera oleh gelombang kenaikan harga BBM di darat. Kondisi limbung mabuk darat dan laut belum dapat diatasi, mendadak sontak muncul angin “puting beliung” berupa berita ikan dengan bahan pengawet formalin yang menyebabkan harga ikan menjadi terperosok. Perubahan salah satu komponen tersebut dalam usaha nelayan akan sangat berpengaruh, mengingat corak ekonomi nelayan sebagaimana meminjam istilah dari Burger, adalah corak ekonomi dari tangan ke mulut yang sulit diharapkan adanya budaya menabung. Musim paceklik pada nelayan yang berlangsung rutin menjadi berita besar, sementara gagal panen pada petani hanya sayup-sayup terdengar. Oleh karena itu R. Firth (1946) dalam beberapa hal yang mempersamakan nelayan dengan petani mempunyai beberapa kelemahan (Widodo, 1994).

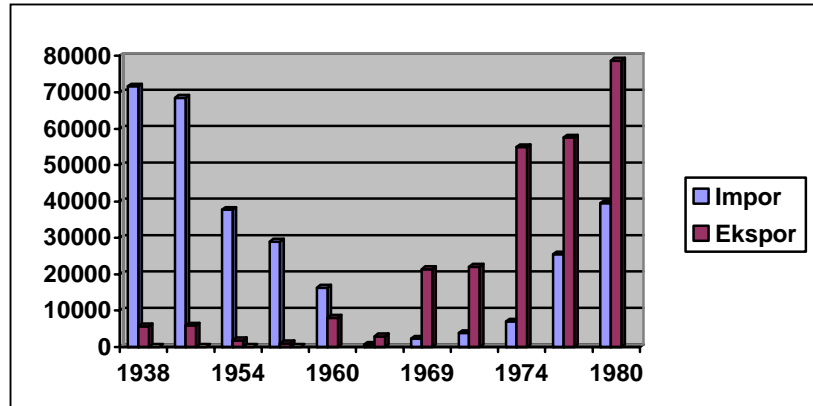
*Dinamika dari
pengimpor menjadi
pengekspor*

Tulisan ini berangkat dari beberapa permasalahan: pertama kebutuhan ikan penduduk pulau Jawa sampai dengan tahun 1960-an, berupa ikan asin dan ikan kering tidak dapat dipenuhi oleh hasil tangkapan nelayan Jawa sendiri, sementara itu sumber daya alam berupa kekayaan ikan di laut Jawa melimpah ruah. Dinamika perubahan terjadi setelah tahun 1970-an dari mengimpor menjadi mengekspor. Melalui penelusuran historis, ketimpangan antara ketersediaan sumber daya alam dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan penduduk pulau Jawa akan dicari penjelasannya. Demikian pula, mengapa baru setelah tahun 1970-an mampu memenuhi kebutuhan dan bahkan mengekspor. Sejumlah pertanyaan dapat dimunculkan; bagaimana bisa terjadi? faktor-faktor apa yang menyebabkan ketimpangan tersebut dapat berlangsung?

Persoalan kedua, hasil tangkapan nelayan berupa ikan mempunyai sifat lekas rusak (*perishable*). Pengawetan merupakan upaya masyarakat nelayan dengan dukungan sarana tertentu agar apa yang telah dihasilkan tetap dalam kondisi terjaga kesegarannya sampai kepada konsumen. Sejarah teknologi pengawetan ikan awalnya dengan menggunakan garam. Dominasi pengawetan ikan dengan garam tersebut berlangsung sampai sekitar awal tahun 1970-an. Kemudian terjadi pergeseran dengan menggunakan bahan berupa es. Bagaimana dinamika perubahan teknologi distribusi ikan dari bahan berupa garam ke bahan dalam bentuk es tersebut berlangsung? Faktor apa saja yang mendorong terjadinya dinamika perubahan tersebut? Bagaimana dinamika kebijakan pemerintah terhadap pembuatan, pengadaan dan pengangkutan garam? Apa kaitan strategisnya antara kebijakan dalam bentuk monopoli garam oleh pemerintah kolonial dengan dinamika usaha perikanan laut? Kelompok mana saja yang dapat memanfaatkan momen dinamika perubahan tersebut?

Sebagai gambaran impor-ekspor ikan antara tahun 1938-1980 adalah sebagai berikut:

**Impor-Ekspor Ikan Tahun 1938 -1980
(dlm ton)**



Sumber: Statistik Poeketbook Indonesia, 1959; Statistik Ekspor dan Impor Hasil Perikanan No. 7, Dirjen Perikanan – Jakarta, 1985.

Skope dan pendekatan

Untuk memberikan uraian penjelasan terhadap dinamika nelayan di pantai utara Jawa, dilakukan penelusuran sumber sebagai bahan penulisan sejarah berdasarkan sumber sejarah yang tersedia. Adapun sebagian penjelasannya, dengan menggunakan bantuan pendekatan ekologi. Perkataan sejarah dalam bahasa Indonesia adalah sama dengan *history* (Inggris), *Geschichte* (Jerman) atau *geschiedenis* (Belanda). Dalam pengertian umum sejarah menyangkut tiga hal, pertama, yaitu kejadian atau peristiwa (*actuality*) yang berhubungan dengan yang nyata di dalam masyarakat sekitar kita. Kedua, yaitu cerita (*narrative*) yang tersusun secara sistematis dari peristiwa umum. Ketiga, yaitu ilmu (*science*) yang bertugas menyelidiki perkembangan peristiwa masa lampau. (Ali, 2005: 12). Kecuali ketiga hal tersebut, sejarah juga sebagai ingatan bersama (*collective memory*). Apa yang kami sajikan ini adalah hasil penyusunan kembali kisah secara sistematis tentang dinamika kebijakan pemerintah terhadap nelayan pantai utara Jawa selama kurun waktu 1900-2000.

*Sejarah perikanan
sebagai bagian dari
sejarah maritim*

Sebagaimana judul di depan, topik persoalan ini termasuk bagian dari sejarah perikanan laut, yakni bagian dari sejarah yang membahas kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam bidang perikanan laut. Bidang ini dapat dibedakan dengan bidang lainnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Berdasar pendapat Mathew (1990) studi mengenai masyarakat pantai termasuk bagian dari studi sejarah maritim. Studi sejarah maritim sangat relevan dengan pertukaran kebudayaan, kestabilan kekuatan politik, dinamika masyarakat, perdagangan, dan agama di kawasan Samudra Hindia. Penelitian sejarah maritim menyangkut masalah-masalah politik internasional, navigasi, transportasi laut, masyarakat pantai, perkembangan pelabuhan dan kota pelabuhan, perdagangan laut, hubungan pelabuhan dengan *hinterland*, sarana komunikasi, sistem hubungan transportasi sungai dengan pelabuhan laut, sistem perbankan dan kredit, aktivitas primer dan sekunder, tingkat produksi, sektor jasa, dan sebagainya. Berdasar pada tingkat intensitas keterkaitan dalam pemanfaatan terhadap laut secara berturut-turut adalah: manusia perahu, nelayan, petani tambak, dan pelayar. Manusia atau orang perahu adalah kelompok masyarakat yang hampir seluruh hidupnya berlangsung di laut (Golba, 1998). Adapun nelayan memanfaatkan laut sebagai tempat menangkap ikan, sedang tempat tinggalnya di darat (Mubyarto, 1984). Sementara itu, petani tambak tinggal di darat mengusahakan lahan di pantai dengan memanfaatkan air laut (Betke, 1985; Hannig, 1986). Sedangkan pelayar niaga memanfaatkan laut sebagai media perlintasan (Soepena, 1987). Adapun beberapa alasan dipilihnya topik ini adalah, *pertama*, perkembangan bidang studi sejarah ekonomi pada dekade terakhir memungkinkan dipilihnya kelompok masyarakat yang lebih luas dengan menempatkannya sebagai kelompok yang berperan aktif.

Masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang menarik dan perlu dibahas lebih banyak oleh para sejarawan, *kedua*, pilihan terhadap topik ini juga sejalan dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Diponegoro, yaitu *Coastal Region Eco-Development*, dan *ketiga*, sesuai dengan visi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro yang menentukan pilihan pada pengembangan keutamaan dalam sejarah maritim. Kemudian pertimbangan pribadi, yaitu kesesuaian terhadap bidang studi yang telah dipilih; yakni studi antropologi-sosiologi nelayan pada studi strata 2, dan studi sejarah perikanan laut dengan tema perkembangan pelabuhan perikanan pada studi strata 3.

Bahwa lingkungan fisik-geografis pantai telah menjadi faktor utama pada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut untuk mengembangkan pekerjaannya sebagai nelayan. Dengan mendasarkan pada ekologi, dapat dilihat hubungan manusia dengan latar belakangnya (Widodo, 1995). Kepentingan melihat hubungan tersebut untuk mendapatkan kerangka analisis mengenai saling pengaruh antara manusia dengan seluruh isi alam lainnya secara lebih mendalam (Geertz, 1979: 1). Sementara itu, Rambo (1983: 3). menyatakan bahwa kebudayaan merupakan produk lingkungan fisik, berupa: topografi, lokasi geografi, dan sumber daya alam. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan lingkungan sebagai determinan (*environmental determinism*). Namun demikian, tingkat perkembangan usaha penangkapan ikan di pantai utara Jawa semasa kolonial sampai dengan tahun 1960-an pasang surutnya ditentukan pula oleh kebijakan politik. Oleh karena itu, dalam peristiwa tersebut, lingkungan semata-mata sebagai pembatas atau penyeleksi. Faktor geografis tidak memberi bentuk pada kebudayaan, melainkan hanya menetapkan batas-batas bagi bentuk yang mungkin terjadi di suatu tempat pada suatu waktu (*environmental possibilisme*) (Geertz, 1979: 2).

Lingkungan dianggap mempengaruhi pola-pola kebudayaan yang secara tidak langsung berpengaruh pada perkembangan kebudayaan yang spesifik (Rambo, 1983) Adapun Julian Steward dengan pendekatan ekologi budaya (*cultural ecology*) membatasi penerapan konsep dan asas ekologi pada aspek-aspek tertentu pada kehidupan sosial dan kebudayaan. Tingkat dan saling hubungan tidak sama dalam segala aspek kehidupan. Pandangan ini sering disebut sebagai *evolusi multilinear* atau *neo evolutionisme*. Aspek-aspek tertentu dari kebudayaan dianalisis dalam ikatan fungsional dengan alam sekitar, di mana saling tergantung antara pola-pola kebudayaan dan hubungan organisasi lingkungan hidup sangat kentara dan penting. Aspek-aspek kebudayaan yang luas disebut “inti kebudayaan”, sementara aspek-aspek kebudayaan yang tidak begitu erat hubungannya dengan proses penyesuaian disebut “aspek kebudayaan selebihnya”. Inti kebudayaan itu meliputi: teknologi, ekonomi, populasi, dan organisasi sosial. Untuk itu unsur yang paling erat dengan sistem mata pencaharian itu perlu dipelajari (Rambo, 1983: 6; Bee, 1974: 149; Maron, 1979: 41). Pendekatan *multilinear* ini kiranya tepat untuk menjelaskan perkembangan motorisasi kapal dan modernisasi alat tangkap.

Perkembangan usaha perikanan juga disebabkan oleh adanya perubahan corak permintaan sebagai akibat dari peningkatan pendapatan. Tingkat hidup rata-rata bangsa Indonesia selama kurun waktu 20 tahun (1969-1989) diukur dengan produk domestik bruto per kapita secara riil, berdasar harga konstan tahun 1983, telah meningkat dari \$ 220 US menjadi \$ 580 US (Djojohadikusumo, 1989: 4). Permintaan pasar menentukan corak komoditas, yang seterusnya akan menentukan bentuk teknologi dan pengurusan tenaga. Teknologi kecuali berupa perahu dan alat tangkap, juga teknologi *penundaan* atau pengawetan ikan. Sebelum dikenal teknologi *coldstorage* atau kamar pendingin dan juga es balok, nelayan telah biasa menggunakan garam sebagai bahan pengawet pengolahan ikan agar komoditas hasil tangkapannya tetap dapat terjaga kesegarannya.

Teknologi pengawetan atau teknologi distribusi tersebut diketahui dan dipahami oleh pemodal, dan mereka ini yang menikmati keuntungan dari semua bentuk usaha perikanan. Raduan (1995) membahas tentang proses perubahan besar usaha perikanan di Borneo Utara dalam kurun waktu 1750 -1990. Sumber daya laut menyediakan komoditas bagi kepentingan perdagangan antarbangsa. Sumber laut telah menjadi kekayaan dan keutuhan kerajaan Sulu. Namun sektor tersebut pada era pemerintahan kolonial dan pascakolonial dipinggirkan oleh kebijakan yang berasaskan pada tanah daratan. Sementara itu, untuk pengurusan terhadap masalah perikanan hanya dilakukan oleh sebuah jabatan kecil di bawah naungan Kementerian Pertanian. Kebijakan yang meminggirkan usaha perikanan di Borneo Utara mempunyai beberapa kesamaan dengan Indonesia, dan bahkan lebih tragis, di masa lalu justru Jawa mengimpor ikan, dan imbrilio kebijakan dasar pembentukan Departemen Perikanan Darat-Laut pada Kabinet Kerja IV Soekarno hanya mampu bertahan dalam masa usia bayi dalam kandungan, harus gugur oleh pergolakan politik (Widodo, 2002). Pembentukan departemen yang secara khusus mengurus masalah perikanan dan kelautan baru muncul pada masa reformasi.

Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, para anggota Senat, dan hadirin sekalian.

Lingkungan alam Laut Jawa

Laut Jawa merupakan bagian dari lingkungan yang lebih luas dari perairan paparan Sunda, paparan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia sebelah barat, yaitu Sumatra, Jawa, dan Kalimantan dengan benua Asia, mencakup Laut Cina, Teluk Thailand, Selat Malaka (Dahuri dkk. 1996: 19). Semula paparan ini merupakan daratan yang utuh dan menyatukan Jawa, Sumatra dan dataran Asia. Bekas-bekasnya terlihat dari dua sistem aliran Sungai Sunda Utara dan Sungai Sunda Selatan. Demikian juga dengan adanya kesamaan jenis-jenis ikan tawar di sungai-sungai pesisir timur Sumatra dengan jenis-jenis ikan tawar di barat Kalimantan sekarang, adalah bukti yang memperkuat pernah menyatunya Sumatra dan Kalimantan. Sementara itu tidak dijumpai adanya kesamaan jenis ikan di pesisir barat Sumatra dengan di timur Kalimantan.

Laut Jawa mempunyai ciri-ciri umum seperti yang dimiliki oleh perairan paparan Sunda, yaitu laut berpantai landai, bertopografi dasar laut datar, berlumpur, dan dangkal, dengan tingkat kekeruhan air yang tinggi diukur dari kandungan sestonnya. Hal ini disebabkan karena laut Jawa menampung aliran sungai dari pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan yang membawa serta endapan. Arus sungai tersebut mempengaruhi kekeruhan. Daerah-daerah muara sungai kandungan sestonnya lebih tinggi dibandingkan dengan perairan tengah. Musim turut pula mempengaruhi kekeruhan aliran arus laut. Pada Musim Barat angin bertiup dari arah barat ke timur, berlangsung dari bulan Desember sampai dengan Pebruari, bersama dengan musim hujan. Adapun Musim Timur angin bertiup dari timur ke barat, berlangsung antara bulan Juni sampai Agustus bersamaan dengan berlangsungnya musim kemarau. Oleh karena itu, pada Musim Barat kandungan seston arus air laut lebih tinggi. Sebagaimana hasil penelitian Suniers, direktur *Het Visscherij Station* – Jakarta, bahwa perairan Laut Jawa kaya akan planton.

Kekayaan populasi plankton ini disebabkan oleh melimpahnya makanan yang ada di dalam air yang terbawa oleh berbagai senyawa dan proses pengadukan. Dengan tingginya plankton tersebut menjadikan Laut Jawa sebagai perairan yang kaya ikan (Rinkes, 1925).

Demikian pula keadaan alamiah Laut Jawa yang airnya relatif tenang, berpantai landai dan dangkal merupakan faktor-faktor yang menguntungkan untuk usaha penangkapan ikan. Pada bulan Januari, temperaturnya di bawah 29 derajat, dengan kandungan garam 31,5-35 ‰. Oleh karena itu, di kawasan pantai utara Jawa sudah lama dikenal adanya wilayah-wilayah yang kaya ikan, di antaranya di teluk dekat Selat Sunda, di sekitar Kepulauan Seribu, sekitar Cirebon, Pemalang, Kendal, Juana, Rembang, Sidayu, Gresik, laut antara pulau Bawean dengan pantai utara Madura, sekitar Sapudi dan Kangean (Rinkes: 1925). Berdasar pada laporan Rinkes bahwa dari tahun ke tahun ikan layang merupakan ikan yang banyak ditangkap, terutama di perairan Madura, dan pantai utara Jawa bagian timur, yang secara kebetulan pada masa akhir-akhir ini wilayah ini banyak memunculkan konflik.

Kekayaan Ikan di Laut Jawa dan kebutuhan penduduk

Sudah lama kekayaan laut Indonesia menarik para ahli. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penelitian yang dilakukan, seperti ekspedisi oleh Rumphius (1627-1702) yang meneliti mengenai binatang laut di sekitar Ambon; ekspedisi *Geographie* dan *Naturaliste* dari Perancis; ekspedisi *Semarang* yang dilakukan oleh Inggris pada tahun 1843-1846, dan ekspedisi *Navara* tahun 1857-1859. Kemudian penelitian lebih khusus mengenai perikanan dilakukan oleh Bleeker dengan sebutan *Challenger* tahun 1872-1876, dan *Valdivia* tahun 1898-1899. Sluiter tahun 1880-1890 meneliti di Selat Sunda. Mortesen tahun 1921 meneliti Ambon, dan tahun 1922 meneliti Selat Sunda. Kampen pata tahun 1907 secara khusus meneliti tentang peralatan nelayan Jawa dan Madura. Sunniers meneliti tentang plancton di Laut Jawa, dan van Oye secara khusus meneliti ikan layang (Rinkes, 1925: 7).

Menurut Handenberg dan Delsman, perairan Laut Jawa mempunyai tidak kurang dari 1.500 jenis ikan (dalam Masyhuri, 1995: 22). Di antara jenis ikan tersebut yang termasuk cukup banyak kuantitasnya adalah: *ikan layur, tengiri, tongkol, bambangan, kakap, belanak, bawal, teri, kembung, bancar, layang, selar, bandeng, petek, kiper, cucut, manyung, dorang, tiga waja, lemuru, putihan, kura, dan pe* (Onderzoek 1905, 2 deel).

Di sisi lain, wilayah daratan pulau Jawa dihuni oleh penduduk dalam jumlah yang banyak dengan tingkat pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 1870 penduduk Jawa berjumlah 16.452.168 jiwa, dan pada tahun 1900 bertambah menjadi 28.746.638 jiwa, pada tahun 1930 sebanyak 41.718.364 jiwa, dan pada tahun 1961 menjadi lebih dari 62.993.000 jiwa (Nitisastro, 1970). Sebagai konsekuensi dari jumlah penduduk yang banyak dan terus bertambah tersebut adalah adanya kebutuhan bahan pangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu kebutuhan tersebut adalah ikan hasil tangkapan nelayan.

Di masa lampau konsumsi ikan terbesar dalam bentuk ikan asin dan ikan kering. Hal ini disebabkan barang tersebut mudah dibawa dan memenuhi kebutuhan para pekerja perkebunan di pedalaman. Kebutuhan ikan asin dan ikan kering di Jawa tersebut dipenuhi dengan mendatangkan dari beberapa kawasan asal luar Jawa dan impor. Sebagai gambaran, tahun 1895 jumlah ikan kering dan ikan asin yang didatangkan dari Singapura ke Jawa sebanyak 28.029.325 Kg, kemudian pada tahun 1900 meningkat menjadi 35.086.325 Kg, terdiri dari ikan yang berasal dari Singapura 33.722.580 Kg dan dari Bagansiapi-api 1.363.755 Kg. Pada tahun 1904, impor ikan di Jawa sebanyak 33.553.782 Kg, berasal dari Singapura 19.534.197 Kg, dan dari Bagansiapi-api sebanyak 14.019.585 Kg (Onderzoek 1905. iste deel: 64). Dari angka impor ikan ke Jawa tersebut, tampak bahwa pada akhir abad XIX mengalami peningkatan, dan sedikit berkurang pada awal abad XX. Hal yang menarik adalah adanya peningkatan yang cukup besar ikan yang berasal dari Bagansiapi-api. Sangat mungkin bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh semakin terbukanya hubungan Bagansiapi-api dengan kota-kota pelabuhan di Jawa. Dengan demikian, peran Singapura sebagai pelabuhan *re-impor* dari daerah sekitar berkurang oleh adanya perluasan transportasi yang memungkinkan adanya pengiriman lebih lancar dari Bagansiapi-api ke Jawa (Butcher, 1996: 98). Angka-angka tersebut cukup meyakinkan bahwa kebutuhan ikan asin dan ikan kering didatangkan dari pulau lain atau bahkan impor dari Singapura.

*Penangkapan Ikan
sebagai Pemenuhan
Kebutuhan*

Rinkes dalam *Het Indische Boek der Zee*, mengemukakan bahwa kegiatan pelayaran sudah dikenal lama oleh orang Indonesia. Adanya relief kapal pada dinding candi Borobudur merupakan bukti mengenai kegiatan pelayaran tersebut (Rinkes, 1925). Namun demikian, kemunculan perahu di Indonesia sudah berlangsung lama sejak zaman prasejarah. Sebagai bukti dapat dilihat pada lukisan-lukisan dinding gua yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Kei dan Irian Jaya. Sementara itu bentuk-bentuk perahu dalam pahatan ditemukan di daerah Batak (Sukendar, 2002: 1). Salah satu kegiatan dengan menggunakan perahu layar adalah melakukan penangkapan ikan sebagai upaya untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup. Di belahan wilayah lain, bukti kegiatan penangkapan ikan sudah lama dilakukan, misalnya dari adanya lukisan yang menggambarkan kegiatan nelayan yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan kano pada dinding Gua Sahara yang diperkirakan dibuat pada tahun 3.500 SM. Kegiatan penangkapan ikan juga telah dilakukan oleh bangsa-bangsa kuno, seperti bangsa Mesir dan Assiria. Gambaran kegiatan penangkapan ikan yang lebih lengkap terdapat dalam roman *Haliutica* dari *Oppian* yang berasal dari tahun 70 SM, yang menyebut sejumlah nama ikan laut yang dapat dicocokkan dengan nama-nama ikan pada masa sekarang. (Cushing, 1988: 4). Lebih khusus mengenai kegiatan perikanan di Jawa terdapat dalam kitab *Koetoro Manawa*. Di dalam kitab ini secara khususnya telah diatur mengenai usaha tambak dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Kitab yang merupakan gabungan hukum secara Hindu dan Jawa, mengharuskan orang mentaati aturan bahwa ikan dalam tambak diakui kepemilikannya, dan bukan ikan yang bebas yang bisa ditangkap oleh siapa saja.

Tampaknya pada masa itu, ikan bandeng telah menjadi komoditas untuk golongan masyarakat atas yang tinggal di lingkungan kerajaan (ENI, 1927; *Visscherijnieuws*, 1949: No.3; Hannig, 1988). Lebih lanjut, mengenai usaha penangkapan ikan di Jawa pada abad XIX dikemukakan dalam *History of Java*, mula-mula berkembang di kawasan timur laut pulau Jawa. Dalam melakukan kegiatannya, nelayan memanfaatkan angin darat untuk berangkat ke laut, dan menggunakan bantuan angin laut untuk pulang ke arah daratan. Adanya angin darat dan angin laut yang saling bergantian arah secara teratur menentukan waktu-waktu nelayan ke dan kembalinya mereka dari laut. Nelayan berlayar ke laut dengan bantuan angin darat yang berhembus pada sore dan malam hari, dan kembali ke darat dengan bantuan angin laut yang berhembus pada siang hari terutama pada sekitar jam dua (Raffles, 1817: 186; Hage, 1910). Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa sampai dengan paruh pertama abad XIX kegiatan penangkapan ikan masih berpusat di pantai utara Jawa terutama di bagian timur (Masyhuri, 1995). Baru kemudian dalam *Zeevisscherijen Langs de Kusten* (Broersma, 1909: 78) dinyatakan secara jelas bahwa dalam tahun 1872 aktivitas penangkapan ikan di laut, baik yang dijalankan di perairan-perairan dekat pantai maupun di perairan-perairan dalam yang jauh dari pantai sudah menjadi salah satu mata pencaharian pokok bagi sebagian penduduk Jawa dan Madura.

Jenis alat tangkap

Lingkungan alam perairan yang dimiliki paparan Sunda dengan aneka jenis habitatnya merupakan kondisi ekologis sebagai faktor primer bahan adaptasi oleh manusia yang menempati kawasan ini. Salah satu hasil adaptasi adalah berupa bentuk peralatan yang digunakan oleh nelayan di kawasan pantai utara Jawa. Alat utama nelayan adalah perahu dan alat tangkap. Perahu dan alat tangkap yang ada di suatu kawasan tidak lain adalah hasil kemampuan manusia dalam menyesuaikan dengan lingkungan alamnya.

Demikian pula fenomena jaring yang digunakan di perairan yang berlumpur, berbeda dengan jaring yang digunakan di perairan yang berkarang. Begitu pula, jenis jaring yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan kecil di permukaan, dengan jenis jaring yang digunakan untuk menangkap ikan yang hidupnya di dasar laut atau ikan-ikan dalam, juga berbeda. Sementara itu, bentuk dan ukuran perahu yang digunakan di laut dekat pantai berbeda dengan bentuk perahu yang digunakan untuk penangkapan di laut lepas pantai. Namun demikian, di antara beberapa bentuk perahu yang digunakan di kawasan Laut Jawa terdapat persamaan, yaitu berupa ciri spesifik pada bagian dasarnya yang berbentuk lengkung menyerupai huruf “U”. (Horridge, 1981).

Secara umum bentuk perahu nelayan di pantai utara Jawa berdasarkan teknik pembuatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jenis *jukung* dan jenis *mayang*. *Jukung* merupakan perahu kecil yang dibuat dari satu batang kayu, dan *mayang* merupakan perahu besar yang dibangun dengan menggunakan papan kayu, baik dengan haluan yang membesar, haluan dan buritan yang melengkung maupun yang tidak melengkung. Perahu *mayang* maupun *jukung* mempunyai berbagai variasi ukuran dengan sebutan yang tidak sama antara daerah yang satu dengan lainnya. *Jukung* digunakan untuk menangkap ikan di laut dekat pantai yang dijalankan oleh tidak lebih dari empat orang. Perahu jenis ini digunakan oleh nelayan di sepanjang pantai utara Jawa, dengan sebutan perahu *jegong*, *landrangan*, *sope*, *pancasan*, *konting*, *bikung*, *kolek*, *kolekan*, *konting*, *binkung*, *kementing*, *jukung-ender*, *jukung-lawak*, *jukung-kiciran*, dan secara luas juga disebut *sampan*. Untuk perahu berukuran besar, yakni perahu *mayang*, dikenal dengan sebutan *perahu rembang*, dan *perahu jawa*. (Scheepvaart en Visserij in de Afdeeling Rembang, dalam *Onderzoek naar de...., 2de Deel, 1905*).

Jenis perahu *mayang* yang digunakan untuk menangkap ikan dilengkapi dengan jaring *payang*. Dalam pengertian umum *payang* digunakan untuk menyebut jaring atau jala, terbuat dari bahan *rami* atau katun dalam ukuran yang besar. Tempat pembuatan *payang* yang sudah lama dikenal adalah Lasem dan Palembang. Beberapa sebutan yang digunakan untuk menamai jaring seperti: *puket, bandet, jaring taktak, jaring rajungan, kerot, serok, sodo, jalenma, goyeng, waring, ngriket, jabur, dapang, cokel, sero* dan lainnya (*Scheepvaart en Vissherij in de Afdeeling Rembang, dalam Onderzoek naar de...., 2de Deel, 1905*).

Hadirin sekalian yang saya hormati,

*Kebijakan terhadap
sektor perikanan*

Kegiatan usaha perikanan pada akhir abad XIX ditandai dengan bergesernya usaha penangkapan perairan laut-dalam lepas pantai ke perairan dekat pantai. Hal ini sebagai akibat berkurangnya jumlah perahu berukuran besar jenis *mayang* dan tidak adanya pembuatan perahu baru. Latar belakang dari kemunduran tersebut disebabkan oleh perubahan yang mendasar dalam sistem investasi, sehingga penanaman modal di sektor perikanan tidak memberikan prospek yang menguntungkan (Masyhuri, 1996: 121). Kemudian adanya perubahan politik kolonial liberal ke politik etis, sebagaimana pidato Ratu Belanda di hadapan parlemen pada tahun 1901, yang kemudian ditindaklanjuti dengan suatu kebijakan yang berorientasi kepada upaya mengatasi kemunduran kesejahteraan atau kemiskinan yang terjadi pada kaum pribumi (Ge Prince dalam Linblad, 1992: 166) merupakan faktor-faktor penting yang mewarnai perjalanan usaha perikanan di Jawa pada masa kemudian.

Sejalan dengan pelaksanaan politik etis, dibentuk komisi yang disebut *Mindere Welvaart Onderzoek* dengan tugas menyelidiki sebab-sebab terjadinya kemunduran kesejahteraan / kemiskinan terhadap penduduk di Jawa dan Madura, serta mencari solusi pemecahannya. Komisi yang dibentuk pada tahun 1902, dan mulai melakukan penyelidikan pada bulan Juli 1904, kemudian melaporkan berbagai hal berkaitan dengan faktor-faktor yang terkait dengan penopang kegiatan perekonomian nelayan, seperti jumlah dan jenis alat tangkap, perahu dengan segala ukurannya, jumlah nelayan, pedagang, pengolah, perdagangan ikan, dsb. (Cribb, 1992: 309). Kerja komisi menghasilkan laporan disertai dengan sejumlah saran yang dimaksudkan sebagai langkah untuk dapat meningkatkan kehidupan nelayan.

Dirumuskan 33 saran yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Dari 33 saran tersebut terdapat 11 saran penting berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan kehidupan ekonomi perikanan secara langsung, yaitu:

1. Pemberian pinjaman uang oleh pemerintah melalui bank khusus nelayan kepada nelayan pribumi tanpa beban bunga;
2. Mengatur pengadaan kayu untuk pembuatan perahu dengan harga murah;
3. Pembebasan ongkos pembuatan garam murah;
4. Perlunya suatu organisasi penyelidikan secara ilmiah;
5. Memberikan ketrampilan kepada nelayan;
6. Perbaikan pengangkutan ikan;
7. Perbaikan pelabuhan-pelabuhan kecil dan melakukan pengerukan muara sungai;
8. Membangun tempat pendaratan ikan, tempat pengeringan ikan dan pabrik pengolahan ikan;
9. Perlunya perluasan daerah pemasaran dengan suatu pusat usaha penjualan dengan menghubungkan dengan daerah luar;
10. Membangun pasar ikan Tanjung Priok, pasar ikan di Jakarta;
11. Perlunya dicoba mengadopsi teknik penangkapan ikan seperti di Eropa atau model Jepang dengan motor dan perahu motor (Onderzoek naar de , 1906, vi, 1a: 65,73; 1b: 2-38)

Pelaksanaan dari salah satu saran tersebut yaitu dilakukannya adopsi teknik penangkapan. Pada tahun 1907 dilakukan penelitian dan percobaan penggunaan jaring tangkap yang lebih besar dan modern. Percobaan dilakukan di beberapa tempat, terutama di Laut Jawa dan Selat Madura. Dipilihnya tempat tersebut untuk percobaan didasarkan pada pertimbangan bahwa di tempat ini kegiatan penangkapan telah berlangsung lama. Percobaan telah memperoleh perhatian yang luas, akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran bagi nelayan setempat. Oleh karena itu, pada tahun 1913 percobaan penggunaan jaring modern dihentikan. Walau percobaan dihentikan tetapi terdapat pengaruh inovasi kepada nelayan lokal berupa usaha merapatkan mata jaring pada kantong, sehingga jaring dapat menangkap keseluruhan ikan, termasuk ikan kecil yang belum dewasa yang belum bernilai untuk dipasarkan.

Akibat dari penangkapan dengan mata jaring yang makin rapat tersebut, kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap deposit sumber ikan. Atas kenyataan tersebut, Roosendal mengusulkan beberapa alternatif agar ikan layang di kawasan Laut Jawa tetap terpelihara; yaitu dengan pembatasan waktu penangkapan. Perlu dilakukan larangan penangkapan ikan secara besar-besaran ketika ikan layang memasuki masa perkawinan, bertelur, dan berkembang hingga masa dewasa pada bulan Mei sampai September. Alternatif lainnya yaitu dengan menjarangkan mata jaring sehingga ikan muda dapat lolos dari tangkapan (Roosendal, *Mededeelingen*:40-41).

Perkembangan yang kemudian adalah adanya perhatian terhadap sektor perikanan yang lebih sungguh-sungguh, tercermin dengan dibentuknya *Afdeeling Visschery* (Bagian Perikanan) di lingkungan *Departement van Nijverheid en Handel* pada tahun 1914. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi *Komisi Mindere Welvaart*. Adapun cakupan tugasnya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan perkreditan, penyuluhan perikanan, penyaluran garam, pendirian pusat-pusat pengasinan ikan, pembangunan, dan perbaikan pasar ikan, serta pembangunan pelabuhan pendaratan ikan. Dalam perkembangan kemudian, secara kelembagaan instansi yang menangani masalah perikanan diorganisasikan pada tahun 1928, dan dalam tahun 1934 dibentuk *het Instituut voor Zeevisscherij* (Lembaga Perikanan Laut). Lembaga ini menerima anggaran keuangan, bertugas mengembangkan penangkapan perahu *mayang* dan peralatan pendukungnya ke dalam sistem yang modern (*ENI*, 1927: 1735).

Adapun mengenai penangkapan ikan di sepanjang pantai diatur dalam *Staatsblad* 1937 No. 570. Dalam ketentuan disebutkan bahwa penangkapan ikan tidak boleh lebih dari 3 mil lepas pantai. Usaha penangkapan yang melebihi dari 3 mil lepas pantai harus memperoleh izin dari pemerintah.

Perkembangan kemudian pada masa pendudukan Jepang, semua perkumpulan penangkapan ikan yang pernah ada dilebur ke dalam organisasi bernama *Gyoo Gyoo Kumiai*. *Kumiai* perikanan tersebut mempunyai tugas utama dalam pengumpulan ikan dan pengadaan ikan untuk keperluan balatentara Jepang (Gunseikanbu, 2605/1945: 63-65)

Memasuki Indonesia merdeka, urusan perikanan laut disatukan dengan perikanan darat. Namun mulai bulan Januari 1949 kedua jawatan tersebut dipisahkan kembali. *Instituut voor de Zeevisscherij* yang dibentuk pada tahun 1934 diubah menjadi Yayasan Perikanan Laut (YPL). YPL mulai tahun 1959 diubah menjadi PT Usaha Pembangunan Perikanan Indonesia (PT UPPI). Untuk mendukung usaha tersebut didirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Perikanan Negara (BPU PN Perikani). Pada sektor perkreditan telah didirikan PT Bank Tani Nelayan (BKTN). BKTN ini pada tahun 1959 telah mengeluarkan kredit sektor perikanan sebanyak Rp. 15.000.000,-. Kemudian dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, BKTN telah memberikan kredit sebanyak Rp. 265.500.000,- yang digunakan untuk kepentingan penampungan produksi perikanan (*Gemah Ripah*, 1968. No.1-2. Th. VI: 15).

Kebijakan penting di sektor perikanan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1961, yaitu dengan tidak memberikan izin impor ikan dari Vietnam Selatan, Siam, Malaya, dan Singapura sebagaimana berlangsung pada masa sebelumnya. Kebijakan tersebut telah membantu dan berpengaruh terhadap pengembangan dan peningkatan produksi ikan yang dilakukan oleh nelayan bangsa Indonesia (*Gemah Ripah*, 1970, No. 9: 14-22). Penghentian impor ikan sejalan dengan pelaksanaan ekonomi *Berdikari*, *berdiri di atas kaki sendiri*. Walau disadari sektor perikanan mempunyai peran penting dalam menopang ekonomi masyarakat, namun sektor ini belum dikelola oleh departemen tersendiri.

Berdasar Keputusan Presiden RI No. 141 dan No. 215 tahun 1964, dibentuk Departemen Perikanan Darat-Laut sebagai dekonsentrasi Departemen Pertanian dan Agraria. Departemen Perikanan Darat-Laut dibentuk pada masa Kabinet Kerja IV Soekarno, berlangsung dari 13 November 1963 sampai 2 September 1964. Umur Departemen Perikanan Darat-Laut yang hanya sekitar umur bayi dalam kandungan tersebut tidak memberi waktu cukup untuk dapat mengimplemantikan program departemen yang telah dirumuskan dalam Rapat Dinas Departemen Perikanan Ke I di Cibogo tahun 1964.

Bentuk kebijakan lain adalah menjadikan perkumpulan koperasi yang ada ke dalam koperasi perikanan. Munculnya kebijakan tersebut disebabkan sebagian besar pemasaran ikan masih dikuasai oleh kelompok kecil pedagang besar dari etnis Cina yang tergabung dalam organisasi dagang *Ek Hoo Goan*. Terbentuknya dominasi kelompok dagang ikan ini sebagai akibat dari kebijakan pemerintah kolonial di masa lampau yang mengatur monopoli impor dan perdagangan ikan dalam negeri melalui sistem lelang. Distribusi ikan sejak dari pelabuhan kedatangan sampai ke pengecer di kota-kota kecil dikuasai oleh jaringan pedagang Cina. Demikian pula perdagangan ikan dalam negeri mulai hasil pembelian dari nelayan penangkap sampai pedagang pengecer juga dikuasainya. Sejalan dengan perubahan politik, nama *Ek Hoo Goan* diganti dengan nama Persatuan Pengusaha Hasil Perikanan Indonesia atau Perapin (Eddiwan, 1963: 9).

Sejalan dengan lahirnya Undang Undang No. 1/1967 tentang PMA dengan segala fasilitas, kelonggaran, dan keringanan yang disediakan, menimbulkan perhatian yang cukup menarik bagi usaha modal asing di sektor perikanan. Sebagaimana aturan yang tertulis, kegiatan penangkapan ikan oleh penanam modal asing bersifat membatasi, sehingga mereka tidak melakukan penangkapan di daerah 3 sampai 5 mil dari pantai.

Di kawasan pantai tersebut telah berlangsung kegiatan perikanan rakyat, sehingga usaha penangkapan oleh pemodal asing tidak mendesak perikanan rakyat (Laporan Tahunan Departemen Maritim 1967: 58).

Sejak tahun 1970-an, volume hasil tangkap mengalami peningkatan yang mengesankan. Namun demikian, kenaikan tersebut diikuti oleh kerusakan lingkungan hayati laut dan makin terdesaknya penghidupan nelayan kecil, sehingga kemudian muncul peraturan tentang pembinaan kelestarian kekayaan yang terdapat dalam sumber perikanan Indonesia (SK MENTAN No. 01/Kpts/Um/75, dan ditindaklanjuti dengan penetapan jalur-jalur penangkapan ikan dengan SK MENTAN No. 607/Kpts/Um/9/76). Pengaturan dan pembatasan beroperasinya kapal dan alat tangkap ikan sebagaimana diatur dalam SK tersebut, pengawasannya tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Pelanggaran penggunaan alat dan daerah operasi telah menimbulkan keresahan dan bentrokan dengan nelayan kecil setempat, sehingga kemudian dikeluarkan ketetapan yang melarang beroperasinya jaring *trawl* (Keppres RI No. 39/1980; Kepmen Pertanian No: 503/Kpts/Um/7/1980; dan untuk Jawa Tengah Keputusan Gubernur Jateng No. 523.4/200/1980). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kepentingan politik menciptakan suasana tenang menjelang Pemilihan Umum tahun 1982. Adapun batas akhir penghapusan *trawl* tanggal 30 September 1980, dan untuk perairan Jawa dan Bali mulai tanggal 1 Oktober 1980 *trawl* harus sudah hilang. Penetapan tanggal-tanggal tersebut dapat dikonotasikan dengan peristiwa G30'S/PKI dan 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila (Widodo, 2005: 198).

Garam dan usaha perikanan laut

Di masa lampau, pengolahan ikan memerlukan garam yang tidak sedikit. Ketersediaan dan keterjangkauan terhadap harga garam merupakan prasyarat berlangsungnya usaha pengeringan dan penggaraman / pengasinan ikan. Namun dalam kenyataannya harga garam di Jawa dan di luar Jawa sangat berbeda. Sebagai gambaran pada tahun 1895, harga garam di Jawa f 1,20 per pikul; dan pada tahun 1911 naik menjadi f 4 per pikul. Sementara itu dalam waktu yang sama di Siam garam berharga 50 sen, di Netherland 67 sen, dan di Bagansiapi-api f 3,25 per pikul. Dalam rentang waktu yang kemudian ketimpangan harga tersebut masih berlangsung. Sebagai misal pada tahun 1930 harga garam di Blora 5 sen/Kg, sementara di Makassar antara 0,25 sen sampai 0,4 sen/Kg, dan di Sumbawa berharga 0,8 sen/KG (*Indisch Verslag*, 1931: 285). Mahalnya harga garam di Jawa sebagai akibat dari pelaksanaan monopoli pemerintah. Bahwa pembuatan garam sampai dengan penyalurannya menjadi wewenang penuh pemerintah (*Het Zoutmonopolie*, 1932). Kondisi pergaraman yang demikian itu mengakibatkan usaha pengolahan ikan di Jawa kurang kompetitif, lebih jauh mengakibatkan usaha pengolahan ikan di Jawa juga kurang berkembang. Meski demikian garam telah menjadi bahan penting dalam teknologi distribusi sehingga ikan hasil tangkapan nelayan setelah diolah dengan cara dibuat ikan asin dan ikan kering akhirnya sampai kepada konsumen.

Sampai dengan akhir pemerintahan kolonial, garam merupakan salah satu komoditas yang pembuatan, penyalurannya dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Penduduk dilarang membuat garam. Pengadaan dan penjualan garam di Jawa hanya boleh dilakukan oleh *pachter* (tukang pach) yang telah memperoleh hak sewa atas suatu wilayah melalui monopoli sewa. Untuk menjaga otoritasnya, *pachter* berwenang melakukan pengawasan terhadap penduduk pribumi kalau ada yang membuat garam (Stbl. Tahun 1941 No. 357 dan 388).

Dalam sejarahnya, pada tahun 1813 Raffles mengganti *sistem pacht* dengan menetapkan garam milik pemerintah dipungut dengan izin Gubernur. Setelah tahun 1921, berlaku aturan-aturan baru berdasarkan Staatsblad tahun 1921 No. 454. Lama kelamaan monopoli garam Gubernur menjadi satu pekerjaan yang terpisah, memakai nama *Zoutregie* dan masuk bagian *Departemen Gouvernementshebedrijven*, dikepalai oleh Kepala *Zoutregie* di bawah direktur tersebut (Stbl. 1924 No. 417, dan Stbl 1929 No. 269).

Memasuki awal Indonesia merdeka, dan berlangsungnya perang kemerdekaan telah menyebabkan pengiriman garam dari Madura ke Jawa terhenti. Oleh karena itu, garam menjadi barang kebutuhan pokok yang ketersediaannya langka. Kondisi yang demikian itu mendorong usaha garam rakyat di pantai utara Jawa, seperti Rembang, Demak, dan Pati. Sampai dengan tahun 1950 usaha garam rakyat tersebut dilakukan tidak resmi dan belum terkoordinir. Dengan meluasnya usaha pembuatan garam rakyat tersebut, garam dikonsumsi oleh penduduk sekitar dan bahkan meluas sampai ke desa-desa yang jauh. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 1949 yang masih dalam suasana perang menyebabkan penyaluran garam dari daerah pantai utara Jawa terbatas ke daerah Renville, sedangkan di daerah Recomba tidak diperbolehkan (Roharsih, 1961: 5)

Dalam perkembangan lebih lanjut, meskipun perang telah berakhir dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, namun kelangkaan garam masih berlanjut di beberapa daerah. Martin Sanders melaporkan bahwa sampai dengan tahun 1956 pembuatan garam masih merupakan monopoli pemerintah. Produksi, perdagangan, transportasi, termasuk pengedarannya diatur dalam *Zout-Regie* (1967, s.i). Dengan mendasarkan pada sudut pandang terhadap kewajiban dari suatu negara terhadap rakyatnya di mana garam merupakan kebutuhan esensial yang harus disediakan oleh pemerintah; sebenarnya intervensi pemerintah dalam pembuatan garam tidak diperlukan, karena garam mudah dibuat di banyak tempat. Pembebasan pembuatan garam akan mengurangi jarak pengiriman antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu monopoli garam oleh pemerintah tidak menguntungkan secara ekonomi. Penempatan garam sebagai salah satu kebutuhan pokok, memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyediakan dan bukan sebagai usaha dari Perusahaan Negara untuk mencari keuntungan.

Untuk memperbesar produksi garam, perlu menghapus *Zoutmonopolie Ordonantie* 1941. Untuk itu Undang undang Darurat penghapusan monopoli garam dan pembuatan garam rakyat disahkan pada tanggal 9 Agustus 1957 dan diundangkan sehari kemudian dalam Lembaran Negara No. 82 Tahun 1957. (Lembaran Negara No. 82/1957 ttg Penghapusan Monopoli Garam)

Untuk waktu kemudian, perubahan besar dalam sistem tataniaga garam berlangsung bersamaan dengan adanya perubahan kepentingan dari pemerintah. Mulai tahun 1957 melalui Undang Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat, pemerintah Indonesia menempatkan garam sebagai kebutuhan utama penduduk terkait dengan masalah kesehatan.

Untuk itu, berdasarkan pada kepentingan pelayanan kepada penduduk dan dengan dasar efisiensi karena banyak tempat yang memungkinkan dijadikan tempat pembuatan, maka garam kemudian menjadi komoditas yang pembuatan dan penyalurannya tidak lagi menjadi monopoli pemerintah. Akibat dari sistem tersebut harga garam menjadi lebih murah yang memungkinkan usaha pengolahan ikan menjadi lebih kompetitif.

Dinamika perubahan lebih lanjut adalah perkembangan teknologi pembuatan es yang berkembang sejalan dengan tuntutan perubahan konsumen terhadap ikan segar. Namun demikian pembahasan terhadap garam di masa lalu dan perkembangannya tetap penting dan relevan untuk menganalisis perkembangan teknologi distribusi hasil tangkapan nelayan sampai kepada konsumen.

Meskipun demikian, perdagangan garam sampai dengan adanya PP 10/59 masih meninggalkan suatu sistem usaha yang dikuasai oleh pedagang keturunan Tionghoa. Golongan Tionghoa merupakan pedagang yang sudah lama menguasai alur distribusi pasar garam sehingga telah terkumpul modal yang cukup. Dengan modal yang cukup tersebut mereka dapat memperlmainkan harga. Pada tingkat petani harga garam sangat fluktuatif. Suatu saat harga garam dapat mencapai 75 sampai 80 sen/Kg, tetapi dalam kesempatan lain hanya berharga 2 sampai 8 sen/Kg. Kondisi yang tidak menguntungkan terhadap petani garam tersebut, melatarbelakangi lahirnya PP 10/59, dengan tujuan agar di satu pihak kepentingan petani garam tidak dirugikan, akan tetapi ketersediaan bagi masyarakat terjamin; maka mulai tahun 1959 koperasi diberi hak sebagai penyalur dan penimbun garam menggantikan peran pedagang Tionghoa (Roharsih: 1961: 34; Saridin, 1964).

Impor ikan dan akibatnya terhadap usaha perikanan laut

Menurut laporan tahunan dari *visschersvereniging* Mino-Sojo Wonokerto Kabupaten Pekalongan pada tahun 1938 sebagian besar ikan hasil tangkapan nelayan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dijual di Pekalongan sendiri, yaitu di kota dan daerah perkebunan di sekitar Wiroseda dan Pekalongan. Ikan olahan dalam bentuk *pindang, peda, dan gereh* dipasarkan oleh bakul ke daerah yang lebih jauh seperti Kalibening, Batur, Nglinggo, Paninggaran dan sebagainya. *Pindang, peda, dan gereh* merupakan komoditas utama dalam bentuk ikan olahan. Untuk pengolahan ikan tersebut, garam merupakan bahan yang harus tersedia dalam jumlah dan waktu sebagaimana dibutuhkan. Harga masing-masing jenis ikan olahan terkait dengan jumlah garam yang dicampurkan. Adapun jumlah garam campuran untuk *peda* adalah 1 kg untuk 4 kg ikan, *pindang* 1 kg garam untuk 8 kg kg ikan, dan *gereh* dengan perbandingan 1 kg garam untuk 16 kg ikan (Jaarverslag van de Visschersvereniging Mino-Sojo 1938: 10). Garam merupakan salah satu komoditas penting, sehingga memberi inspirasi untuk diungkapkan dalam bait tembang *empluk wadah uyah* (garam). Kondisi demikian itu sampai dengan akhir tahun 1960-an masih banyak dijumpai di Jawa Tengah. Ikan untuk keperluan konsumsi pada umumnya masih dalam bentuk ikan olahan secara tradisional, dan hanya sebagian kecil dalam bentuk ikan segar (Laporan Tahunan Dinas Perikanan Laut Jawa Tengah, 1969: 37).

Dengan demikian, dalam teknologi distribusi ikan, garam sebagai bahan pengolah ikan yang berfungsi untuk mempertahankan mutu ikan, sampai dengan akhir kolonial berperan sangat penting sebagai penopang utama dalam teknologi distribusi. Penggunaan bahan dasar garam dalam teknologi distribusi tersebut terus berlangsung sampai dengan dua dekade Indonesia merdeka. Bahwa sampai dengan akhir tahun 1960-an kebijakan di sektor perikanan pada prinsipnya masih melanjutkan kebijakan masa kolonial (Bailey, 1988).

*Perdaganganiikan
segar dengan es*

Kebijakan dasar dalam masalah pemasaran tercantum dalam Garis-Garis Besar Usaha Peningkatan Pembangunan Fisik Perikanan yang ditujukan terhadap tersedianya fasilitas pemasaran yang dapat menimbulkan dan meluaskan pasaran hasil-hasil perikanan sehingga merangsang penanaman modal di dalam aktivitas produksi dan pemasaran, baik untuk tujuan domestik maupun ekspor. Program yang mendesak untuk dilakukan adalah penyediaan ikan segar, baik mutu (kualitas) maupun peningkatan volume (kuantitas) khususnya untuk memenuhi kebutuhan kota-kota besar, karena daerah ini berpotensi yang kuat dalam hal konsumsi hasil-hasil perikanan. Sebagaimana telah kita kenal, bahwa hasil perikanan dapat dibagi dalam bentuk ikan segar (*fresh fish*), ikan hidup (*live fish*), dan ikan olahan (*conservation*). Dalam rencana tersebut ikan segar ditempatkan pada urutan utama. Kebijakan selanjutnya adalah dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, khususnya pendapatan nasional per kapita dan pola konsumsi, maka kebijakan dititik-beratkan terhadap penyempurnaan mutu ikan segar dan ikan olahan yang ada. Strategi kebijakan mengarah pada ketersediaan ikan segar. Bahwa kesejahteraan produsen merupakan bagian dari program untuk meningkatkan besarnya keuntungan yang ditetapkannya (Dirjen Perikanan, 1974: 4).

Untuk itu dilakukan survey pemasaran ikan segar di Jawa sebagai daerah konsumsi utama, pasar potensial sebagai akibat adanya peningkatakan pendapatan, dan dalam rangka perbaikan pendekatan pemasaran ikan. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, penting pula memperhatikan kesejahteraan produsen dalam arti memberikan kesempatan bahwa usaha penangkapan merupakan usaha yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis dan dapat mendorong adanya perluasan usaha. Dengan demikian, upaya memperbesar keuntungan yang diterima oleh produsen merupakan sasaran pokok bagi usaha pengembangan sektor perikanan.

Dengan meningkatnya pendapatan produsen, menambah kemampuannya untuk memodernisir dengan memperluas usaha untuk meningkatkan produksinya. Untuk menambah kemampuan usaha produsen secara selektif diusahakan kredit lewat bank. Dalam hubungan ini proyek yang dimintakan pembiayaan lewat kredit bank, haruslah merupakan proyek yang *economic and financial feasible*, mempunyai manajemen yang sehat dan pemasarannya terjamin. Karenanya penting adalah membina para pengusaha untuk mampu menerima dan melaksanakan kredit tersebut. Pada hakikatnya kesejahteraan para produsen perikanan hanya dapat dicapai oleh produsen itu sendiri, sedangkan pemerintah bertugas dan berkewajiban memberikan bimbingan mempersiapkan serta mengarahkan segala fasilitas yang memungkinkan produsen perikanan dapat berusaha dengan iklim yang baik atas kekuatan sendiri (Rencana 1974: hlm IX: 10-11).

Dasar pemikiran dari program peningkatan tersebut berangkat dari sifat ikan yang cepat rusak (*perishable*), dan tidak sempurnanya fasilitas-fasilitas penyimpanan dan pengangkutan selama dalam proses pemasaran hasil-hasil perikanan yang tidak efisien, mengakibatkan harga ikan di daerah-daerah produksi sangat rendah sedangkan harga di daerah konsumen cukup tinggi. Harga-harga rendah di daerah produksi mengakibatkan tidak adanya perangsang pada produsen untuk meningkatkan produksinya, sedangkan harga-harga yang tinggi di daerah konsumen mengurangi konsumsi ikan. Kondisi semacam itu harus segera diakhiri. Dengan rencana perbaikan fasilitas-fasilitas pemasaran yang menyangkut penyimpanan (pengawetan) dan pengangkutan, dengan harapan harga pada taraf produsen akan meningkat sedangkan pada taraf konsumen menurun (Dirjen Perikanan, 1974: XI, 21).

Mulai awal tahun 1970-an sistem teknologi distribusi ikan, dengan bahan es (es balok/es batu) sebagai bahan pengawet ikan mulai menggeser dominasi peran garam. Meningkatnya kebutuhan es pada tahun-tahun tersebut, dapat dijumpai dalam salah satu laporan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan bahan mentah yang cukup segar bagi pengolahan *pindang* sering mengalami kesulitan karena ikan yang didaratkan telah sangat mundur mutunya, disebabkan oleh lamanya operasi penangkapan yang tidak disertai es sebagai pengawet. *Pindang* atau *ikan pindang* merupakan hasil olahan yang banyak disukai. Pengolahannya menduduki tempat kedua dalam urutan cara-cara tradisional setelah ikan asin / kering, baik dalam volume ataupun nilai perdagangannya. Dari hasil tangkapan perahu-perahu layar yang tidak membawa es, sulit dijamin mutu bahan mentah yang cukup baik, apalagi penangkapan dilakukan cukup jauh dari pangkalan. Memang masih diakui pula bahwa penggaraman ikan di kapal selama 12 jam sebelum diolah menjadi pindang dapat menghasilkan pindang yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang diolah dari ikan yang tidak digarami atau di-es dalam waktu yang sama. Meskipun mulai tergusur oleh es, garam masih merupakan salah satu bahan penting yang dapat mempertinggi mutu dan daya awet ikan. Pengolahan ikan asin biasanya dilakukan dengan membubuhkan garam dapur (*natrrium clorida*) kepada ikan, di mana jumlah garam yang diberikan tergantung pada beberapa faktor, antara lain: kesegaran ikan, jenis ikan,

ukuran besar, dan ketebalannya (Nasran dan Suparo, 1972).

Sistem distribusi dan perdagangan ikan asin di Indonesia sejak tahun-tahun tersebut cepat mengalami kemunduran, penyebabnya adalah cara-cara *handling*, pengepakan, penyimpanan, transportasi serta distribusi, dengan derajat suhu dan kelembaban yang tinggi, mudah diserang jamur dan serangga, dan lain-lain penyebab yang mengakibatkan produk ikan asin tersebut hanya dapat bertahan dalam waktu yang relatif singkat, antara dua hingga tiga bulan. Selama penyimpanan, produk ikan asin mengalami kemunduran mutu secara kimiawi dan mikrobiologis yang dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban yang tinggi. Proses ini dipercepat oleh kerusakan-kerusakan fisik akibat *handling* yang kasar, serangan serangga, rodentia, dan lain-lain. Penyimpanan ikan dengan suhu rendah (enam derajat C) terbukti sangat bermanfaat untuk mencegah kemunduran mutu dan memperpanjang daya awet, hingga jauh lebih panjang. Untuk bekal pengawet bagi kapal penangkap ikan selama dalam kegiatan di laut, cara yang dilakukan oleh nelayan adalah dengan memberi es / es batu pada palka, tempat ikan di kapal. Pemberian es batu dilakukan kembali pada drum plastik tempat ikan diangkut sampai pasar / konsumen. Dengan pemberian es tersebut, ikan menjadi ikan beku atau ikan yang tetap terjaga kesegarannya.

Memasuki era 1980-an, es sudah menjadi kebutuhan bagi nelayan sebagai salah satu bekal utama ketika kapal yang akan berangkat melaut. Bekal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya ikan hasil tangkapan selama di kapal tetap terjaga kesegarannya. Ketidak-tersediaan es menyebabkan tertundanya kapal untuk berangkat, atau terpaksa memindahkan kegiatan penyiapan di daerah lain yang dapat menyediakan es. Sementara itu pabrik es yang beroperasi dari tahun ke tahun terus bertambah. Data di Kotamadia Pekalongan, misalnya, pada tahun 1981 ada dua pabrik es, 1983 menjadi tiga buah, tahun 1985 bertambah menjadi enam, tahun 1987 ada tujuh, dan tahun 1988 menjadi delapan buah.

Adapun pemilik pabrik es tersebut adalah, satu pabrik milik BUMN, dan lainnya milik orang Cina. Satu persoalan yang pelik adalah harga ikan hampir pasti pasang-surut atau naik turun, tetapi harga es hanya mengenal pasang dan tak pernah surut. Oleh karena itu, ada penjelasan bahwa mahalnya harga es balok mendorong nelayan atau pedagang mengambil jalan pintas dengan menggunakan formalin. Di pasaran, harga formalin tidak lebih dari Rp 5.000 / liter. Cairan ini pun dapat diencerkan hingga konsentrasi 37%. Artinya, untuk mencapai konsentrasi 37%, hanya diperlukan campuran 370 mililiter dalam satu liter air. Adapun harga es balok Rp. 12.000 per bal. Akibat temuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang dipublikasikan besar-besaran, menyebabkan omzet penjualan ikan turun drastis pada Januari 2006. Pendapatan turun 30%. Tidak hanya transaksi yang merosot, harga ikan juga ikut turun antara Rp. 1.000 – Rp. 3.000. Pedagang ikan segar serta nelayan juga mengeluh. Harga es balok tidak pernah turun, padahal pedagang dan nelayan mau tidak mau memakai es balok untuk mengawetkan ikannya (*Suara Merdeka, 23 Januari 2006*)

Ketua Senat, Sekretaris Senat, para Anggota Senat, dan hadirin yang saya hormati

Keberadaan masyarakat nelayan pantai utara Jawa terkait dengan faktor ekologi kawasan berupa wilayah perairan dengan segala ciri spesifik topografi, lokasi geografi, dan sumber daya alam. Laut Jawa sebagai bagian dari wilayah perairan paparan Sunda, memiliki karakteristik sebagai pantai yang landai, berlumpur, dengan dasar laut yang datar.

Adapun kekayaan plankton disebabkan oleh aliran-aliran sungai bermuara di perairan ini yang membawa unsur hara, dan diperkaya dengan proses pengadukan oleh pergantian musim yang secara teratur menjadikan tercukupinya ketersediaan bahan makanan untuk ikan dan binatang laut lainnya.

Berdasar pada sumber-sumber yang dapat dilacak, masyarakat nelayan pantai utara Jawa telah melangsungkan kegiatan penangkapan ikan sudah sejak lama. Dalam Kitab *Koetoro Manowo* telah diatur mengenai kegiatan perikanan tambak di wilayah Majapahit. Kemudian pada periode selanjutnya Raffles memberikan keterangan mengenai kelompok masyarakat yang melakukan pekerjaan menangkap ikan di kawasan perairan Laut Jawa bagian timur laut.

Memasuki abad XX, sejalan dengan dilaksanakannya politik etis; dibentuk suatu komisi dengan tugas untuk meneliti sebab-sebab kemunduran kesejahteraan atau kemiskinan masyarakat Jawa dan Madura, serta mencari solusinya. Untuk masyarakat nelayan telah dirumuskan 33 saran, akan tetapi yang terkait langsung dengan pembangunan perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan terdapat 11 rumusan. Kebijakan nelayan masa kolonial pada dasarnya belum berubah secara berarti sampai dengan tahun 1960-an. Perubahan penting sektor perikanan adalah dengan ditetapkannya politik Berdikari, dengan tindakan melarang impor ikan.

Pasang surut dinamika usaha perikanan juga dipengaruhi oleh pelaksanaan monopoli garam oleh pemerintah. Garam sangat diperlukan untuk mengolah ikan menjadi ikan asin dan ikan kering. Akan tetapi harga garam di Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah luar Jawa apalagi luar Indonesia. Tingkat perkembangan sektor usaha perikanan yang tidak dapat berlangsung secara wajar, dalam artian sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya, berarti terjadi proses ketimpangan. Salah satu sebab ketimpangan tersebut adalah ditempuhnya kebijakan impor ikan untuk memenuhi kebutuhan ikan dari penduduk yang tinggal di Jawa.

Teknologi distribusi yang telah berlangsung lama adalah berdasarkan pada pengolahan / pengawetan ikan dengan bahan garam. Akan tetapi sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, terutama di daerah perkotaan, telah terjadi perubahan permintaan terhadap ikan kepada jenis ikan segar. Ikan yang tetap dapat dijaga tingkat kesegarannya. Untuk itu teknologi distribusi dengan menggunakan es menjadi tuntutan sesuai dengan permintaan pasar. Es dibutuhkan oleh nelayan sebagai bahan untuk menjaga kesegaran ikan selama dalam kegiatan penangkapan, dibutuhkan oleh pedagang untuk menjaga kesegaran ikan selama dalam pengangkutan sampai kepada bukul di kota atau konsumen. Dengan demikian, perubahan dinamika permintaan pasar terhadap ikan segar menjadi tuntutan harus dipenuhi agar tetap terjalinnya hubungan produsen – konsumen, dengan memenuhi selera konsumen. Hanya saja seperti yang dikatakan oleh Raduan, penguasa yang sebenarnya pada sektor usaha perikanan adalah yang menguasai teknologi distribusi. Sementara itu, dari penelusuran terhadap penguasa pengendali teknologi distribusi ikan dapat dinyatakan bahwa ketika garam masih merupakan bagian dari monopoli pemerintah, pengendalinya adalah para pemenang sewa lelang; yakni para *pachter* yang sudah tentu dari etnis Cina.

Demikian pula fenomena pemilik pabrik es yang mulai berlangsung sejak tahun 1980-an, sebagian besar juga dari etnis tersebut. Namun terhadap pemilik formalin! Jawabnya belum ada sejarawan yang menelitinya.

Topik sejarah nelayan ini dipilih dengan tujuan untuk memperkaya nuansa penulisan Sejarah Maritim Indonesia. Semoga.

Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, para Anggota Senat, dan hadirin yang saya muliakan. Izinkanlah saya untuk memberikan pesan kepada mahasiswa dan rekan dosen muda.

Pesan untuk mahasiswa

Izinkan saya memberikan pesan kepada mahasiswa, utamanya kepada mahasiswa yang sekarang sedang menekuni ilmu sejarah di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Bahwa Saudara adalah sebagai generasi penerus yang memiliki tugas untuk mengungkap berbagai peristiwa sejarah yang masih sangat melimpah ruah. Saya katakan melimpah, jika Saudara dapat mencari benang merah dari ilmu yang sedang Saudara tekuni dengan masalah kontemporer masa kini. Tidak ada masalah yang tidak dapat diungkap dengan perspektif kesejarahannya. Untuk itu, pupuklah semangat untuk selalu membangun optimisme bahwa Saudara pasti bisa.

Pesan untuk Dosen Muda

Kepada rekan-rekan Dosen Muda, apa yang saya capai ini akan memberi manfaat dengan mendorong kepada Saudara untuk segera menyusulnya. Saya percaya telah ada pada benak Saudara, bahwa Saudara sekalian pasti bisa, karena telah berpikir bisa. Jika fokus telah ditetapkan, setiap langkah hendaknya tertuju pada fokus itu. Fokus itu Saudara yang menentukan, dan langkah-langkah menuju fokus itu Saudara pula yang merencanakan.

*Ucapan terima
kasih*

Sebagai penutup dari pidato saya ini, dengan penuh rasa syukur dari hati yang terdalam saya menyampaikan terima kasih bahwa berkat bantuan dan do'a Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian saya dapat diangkat dalam jabatan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Sejarah. Syukur atas ridho Allah, dan terimakasih kepada semua guru kami mulai dari guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan dosen kami di jenjang strata 1, strata 2, dan strata 3, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA., yang telah memberi pengesahan pengangkatan pada jabatan Guru Besar saya dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, per 1 Maret 2006 (Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 13521/A2.7/KP/2006, tertanggal 28 Pebruari 2006)

Selanjutnya, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp.And., selaku Rektor/Ketua Senat yang telah berkenan mengukuhkan saya sebagai Guru Besar dalam Ilmu Sejarah. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., dan Anggota Dewan Guru Besar Senat Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan memproses pengusulan saya sebagai Guru Besar dalam Ilmu Sejarah. Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. A.M. Djulianti Suroyo sebagai ketua Peer Group dan Prof. dr. H. Soebowo, DSPA sebagai sekretaris Peer Group; serta Prof. Dr. Nurdien H. Kistanto, MA., Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D., Prof. Dr. Ir. Lachmudin Sya'rani, Prof. Drs. Soedjarwo, dan Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp. PD. (KTI) atas asupan dalam penyempurnaan pidato pengukuhan ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pengajar tempat saya menimba ilmu, dan juga para pembimbing: Prof. Dr. Hamid Abdullah (alm) pembimbing S1 yang mendorong dan memberi kesempatan menjadi pengajar, Drs. Djuhar Noor, SU selaku Dosen Wali atas bimbingan dan perhatiannya; Prof. Dr. Ganjar Kurnia, DEA., Prof. Dr. Samsunuwijati Mar'at, Dr. Usman Hardi, MS, selaku pembimbing yang telah menghantarkan pada jenjang magister dalam Sosiologi-Antropologi, Prof. Dr. A.B. Lopian, dan Dr. Masyhuri selaku promotor dan co-promotor sehingga saya mencapai derajat doktor dalam Ilmu Sejarah.

Kepada Ibu Prof. Dr. Sri Rahayu Prihatmi, MA., (alm), para Anggota Senat Fakultas Sastra saya sampaikan ucapan terima kasih, telah menyetujui dan mengusulkan ke tingkat universitas atas usulan kenaikan jabatan Guru Besar saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Nurdien H. Kistanto, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra yang telah memberikan perhatian terhadap kegiatan pengukuhan, yang sebelumnya juga selalu mendorong untuk segera mengajukan kenaikan jabatan ke Guru Besar. Demikian pula kepada para Pembantu Dekan, rekan-rekan dosen dan rekan-rekan bagian administrasi Fakultas Sastra, saya menyampaikan terima kasih. Penghargaan dan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan panitia dari fakultas dan universitas yang telah membantu mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pengukuhan saya.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, SP.Bd. sebagai Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, yang selalu memberikan dorongan untuk memperhatikan masalah kenaikan jabatan dengan *sentilannya* bahwa sebagai pengelola Pusat Kajian yang berada di bawah Lembaga Penelitian sudah seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan dalam pengumpulan kredit poin bidang penelitian. Demikian juga terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman di Pusat Studi dan Pusat Kajian, dan teman-teman bagian administrasi di Lembaga Penelitian, teman-teman di Badan Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro atas kerjasama yang baik selama ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada teman-teman Tim Java Sea, yang diketuai oleh Ibu Prof. Dr. Djuliaty Suroyo. Kegiatan Java Sea Project dengan sponsor Pemerintah Indonesia melalui Penelitian Hibah Bersaing, Pemerintah Belanda, dan The Toyota Foundation banyak memberi kesempatan dalam penelitian dan pertemuan ilmiah nasional dan internasional. Atas kerjasama yang terjalin dengan baik, telah memberikan kontribusi yang sangat bermakna terhadap terainya jabatan Guru Besar saya. Untuk itu dengan rasa yang tulus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada “Tim Maritim / Marinir”, dengan anggota Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum., Dr. Endang Susilowati, MA., Drs. Agustinus Supriyono, MA., Drs. Indriyanto, M.Hum., dan Dra. Chusnul Hayati, MS.

Sudah tentu terainya jabatan Guru Besar ini juga atas bantuan dari banyak pihak. Kepada Undip-McMaster Project, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, The Toyota Foundation saya sampaikan ucapan terima kasih atas bantuannya.

Kepada keluarga dari istri; mbak Murni, mbak Dar, mbak Titik; dan keluarga dari saya; mas Pur, mas Pangkat (alm) saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan secara khusus kepada mertua saya, Bapak Darmudji (alm), dan Ibu Zaetun (alm) atas doa dan restunya.

Kepada Bapak saya, H. Hadi Sucipto (alm), saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas do'a yang dipanjatkan untuk perjalanan karir, termasuk jabatan Guru Besar saya ini. Dengan diterimanya Surat Keputusan saya sebagai Guru Besar pada bulan Juli minggu ke 2 tahun 2006, kegembiraan, syukur, dan rasa bangga telah terucap, dan Bapak telah membuat rencana untuk hadir pada acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar. Namun rencana bersuka cita itu kedahuluan oleh PanggilanNya, Bapak pada hari Kamis Pon tgl 2 November 2006 jam 09.30 *menjalani garis hidup telah sowan di alam kelangengan*. Kepada Ibu saya, Ny. Hj. Tentrem Hadi Sucipto, dengan penuh hormat dan syukur, mohon restu agar saya dalam menerima amanah jabatan sebagai Guru Besar, menjadi guru yang baik dan tetap rendah hati.

Akhirnya kepada istri tercinta, Zulaechah, S.H. saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pengertian dan pengorbanannya. Jabatan sebagai Guru Besar yang saya raih adalah keberhasilan kita. Untuk itu sebagai rasa syukur harus kita jaga bersama. Kepada anak-anakku, Laras, Sinta, dan Ratih, terima kasih atas pengertiannya. Apa yang saya capai ini atas dorongan Kalian juga. Kalian telah berhasil mendorong saya mencapai sesuatu yang sangat bermakna.

Sekian,

Wassalamu'alaikum warachmatullahi wabarokatuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Ali, R. Moh., 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.
- Bailey. C., 1987. *Indonesia Marine Capture Fisheries*. Indonesia: Marine Fisheries Research Institute, Ministry of Agriculture.
- Bailey, C., 1988. "The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia", *Indonesia*, No. 46: 25-38.
- Bee, Robert L., 1974. *Patern and Processes*, New York: The Free Press.
- Betke, Friedhelm, 1985. *Modernization and Socio-economic Change in the Coastal Marine Fisheries of Java: Some Hypotheses*. Jerman: University Bielefeld.
- Broersma, 1909. *Langs Midden-Java's Noordkust*. Semarang: van Dorp.
- Butcher, John G. 1996. "The Salt Farm and The Fishing Industry of Bagan Si Api Api", *Indonesia*, No. 62. hlm. 90-120.
- Cribb, R., 1992. *Historical Dictionary of Indonesia*. London: The Scarecrow. (p. 309)
- Cuching, D.H. 1988. *The Provident Sea*. New York: Cambridge University Press.
- Dahuri, Rokhmin. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Delsman, H.C., 1939. *Fishing and Fish Culture in the Netherlands Indie*, Bulletin of the Colonial Institut of Amsterdam, Vol. II Published in Callaboration with the Netherlands Pacific Institut, Amsterdam-Holland.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1989. *Perkembangan Ekonomi Indonesia Selama Empat Tahap Pelita 1969/1970-1988/1989*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE Universitas Indonesia.
- Djuliati Suroyo, A.M., dkk. 1999/2000. *Kawasan Laut Jawa dalam Abad Transisi 1940-1970*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Dirjen Dikti. (laporan tahun ke tiga)
- Djawa*, 1926.
- Eddiwan 1963, "Prinsip Integrasi Dari Usaha Koperasi Perikanan" dalam *Kapita Selekt Perikanan Laut*. Jakarta: Peringatan Dwi-Windu Induk Koperasi Perikanan Laut.
- Emmerson, Don. 1977. "Tingkat-Tingkat Makna: Memahami Perubahan Politis Dalam Suatu Masyarakat di Indonesia" dalam *Cakrawala* No. 2 Th X, UKSW: Salatiga.
- Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* (ENI), 1927. s'Gravenhage/Leiden, Nijhoff/Brill.

- Firth, R., 1946. *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*, New York: Norton & Company Inc.
- Geertz, Clifford C., 1979. *Involusi Pertanian: Proses perubahan ekologi di Indonesia*. Terj. Bhratara, Jakarta.
- Golba, Sindu. 1998. *Orang Lut*. Makalah terdiri 25 halaman, tanpa keterangan lain (s.i.; s.n.)
- Hall, D.G.F., 1955. *A History of South-East Asia*. London: Macmillan Press.
- Handenberg, J.D.F., 1960. *Perikanan Laut Indonesia*. Djakarta: Balai Buku Indonesia.
- Hall, K.R., 1994. "Economic History of Early Southeast Asia", dalam N. Tarling (ed), *The Cambridge History of Southeast Asia*, Vol. I. From early Time to c. 1800. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hannig, W. 1988. *Towards a Blue Revolution: Socio-Economic Aspects of Brackish Water Pond Cultivation in Java*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Het Zoutmonopolie*, 1932. Batavia: Volkslectur / Monopoli-Garam, 1932. Jakarta: Balai Poestaka
- Horridge, G.A., 1981. *The Prahau: Traditional Sailing Boat of Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Jakoep, Raden Moehamad, 1911. *Poeniko Serat Karti Wisaja: Anjarijosaken bab pakarjan soho pamendeting oelam seganten mawi gambar nemlikoer idji*. Seri uitgaven door bemiddeling der Commissie voor de Volkslectuur No. 961.
- Kampen, van P.N., 1909. *Hulpmiddelen der Zee Visscherij op Java en Madoera in Gebruik*, Batavia: Kolff.
- Kampen, van P.N., 1922. *Visscherij en Vischteelt in Nederlandsch Indie*, Haarlem, HD Tjeluk Willink & Zoon.
- Kantor Pengajaran / Naimubu, *Atoeran-Atoeran Seinendan*, 2605 (1945).
- Koloniaal Tidschrift*, Tahun 1828 dan Tahun 1937.
- Lapian, A.B., *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia tanggal 4 Maret 1992.
- Maron, Emilio P., 1979. *Human Adptation: An Introduction to Ecological Anthropology*. California: Wodswarth Publis.
- McEvoy, A.F., 1986. *The Fishermen's Problem: Ecology and Law in The California Fisheries, 1850-1980*, London: Cambridge University Press.
- Masyhuri. 1995. *Pasang Surut Usaha Perikanan Laut: Tinjauan Sosial Ekonomi Kenelayanan di Jawa dan Madura, 1850-1940*. Disertasi Vrije Universiteit, Amsterdam.
- Masyhuri, 1996. *Menyisir Pantai Utara*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

- Mathew, K.S. (ed). 1990. *Studies in Maritime History*. Pondichery: Pondichery University.
- Mededeelingen van de Onderafdeling Zeevisscherij No. 8 “Verlag van de Vischeilingen aan de Noordkust van Java over 1940”.
- Mededeelingen van het Visscherij Station te Batavia No. 2 dan No. 5.
- Mubyarto dkk, 1984. *Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.
- Murphy, R., “On Evolution on the Port City”, dalam Frank Broeze (ed), 1989. *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from 16th-20th Centuries*, Kensington: New South Wales University Press.
- Nasran dan Suparo, 1972. Ikan Asin Kering: Pengaruh Perlakuan dengan Asam Cuka dan Penyimpanan pada Suhu Redah. Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Perikanan.
- Nitisastra, Widjojo, 1970. *Population Trends in Indonesia*, London: Cornell University Press.
- Raduan, Mohammad bin Mohd. Arief, 1995. *Dari Pemungutan Tripang ke Penundaan Undang: Sejarah perkembangan perusahaan perikanan di Borneo Utara 1750-1990*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Raffles, Th. 1817. *History of Java*, London,.
- Rambo, Terry A., 1983. *Conceptual Approaches to Human Ecology East-West Centre*. Honolulu, Hawaii, 1983.
- Rentjana Penggantian Kedudukan W.N.A Tjina Dibidang Perikanan oleh Koperasi Perikanan Sebagai Pelaksanaan Dwi-Darma dan Tjatur Karja Kabinet Ampera, 1967, Jakarta: Induk Koperasi Perikanan Indonesia.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Kedua Sektor Pertanian/Sub Sektor Perikanan 1974/1975-1978/1979: Strategi Operasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan.
- Rencana Regional Pembangunan Perikanan dalam Repelita II, Strategi Dasar, Buku I, Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan.
- Rinkes, A.D., et.all. 1925. *Het Indische Boek der Zee*. Weltevreden.
- Roharsih, 1961. *Perkembangan Ko-opersi dan Hubungannya Dengan PP 10/59 Khususnya Dalam Bidang Penggaraman Rakyat: Suatu Keadaan di daerah-daerah Rembang, Pati dan Demak*. Bogor: Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. (mf. Koleksi KITLV).
- Roosendal, van . Mededeeligen van het Visscherij-Station te Batavia.

- Saridin, Rasjid. 1964. *Tataniaga Garam Negara dan Garam Rakyat di Djawa Tengah*. Bogor: Hasil Penelitian Institut Pertanian Bogor. (mf. Koleksi KITLV)
- Sedyowati, Edy dan Susanto Zuhdi. 2001. *Arung Samudra: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapien*. Jakarta: Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Setyawanta R.L.T., 2005. *Masalah-Masalah Hukum Di Wilayah Pesisir Dan Laut*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sukarno, 1965. *Berdiri diatas Kaki Sendiri (Berdikari)*. Jakarta: Prapantja.
- Sukendar, Haris (ed), 2002. *Perahu Tradisional Nusantara: Tinjauan melalui bentuk dan fungsi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soepena, S.,1987. *Buku Sejarah Perkembangan Pelayaran Indonesia*. Jakarta: Pustaka Maritim.
- Steward, Julian H., 1979. *Theory of Culture Change*. Illinois, USA,.
- Tijdschrift voor Economische Geographie I, 1910.
- Welvaartcommissie, 1905. *Der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, I. Samentrekking van de Afdelingsverlagen over de Uitkomsten der Buitenbezittingen naar de Vischteelt en Visscherij*, Batavia: Landsdrukkerij.
- Welvaartcommissie, 1905. *Der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Ia, Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Vischteelt en Visscherij en Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen*, 1e deel, Teks, Batavia: Landsdrukkerij.
- Welvaartcommissie, 1905. *Der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Ib, Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Vischteelt en Visscherij en Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen*, 2e deel, Bijlagen, Batavia: Landsdrukkerij.
- Welvaartcommissie, 1905. *Der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Ic, Voorstellen der Welvaart Commissie in Zaken Vischteelt en Visscherij*, Batavia: Landsdrukkerij.
- Widodo, Sutejo K., 1994. *Teknologi dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Ujungbatu Kabupaten Jepara*, Universitas Padjadjaran Bandung (Tesis)
- , 1995. “Nelayan dan Lingkungannya”, artikel dalam *Majalah Susastra*.
- , 1996. *Dampak Motorisasi terhadap Hubungan Kerja, Sistim Bagi Hasil, dan Orientasi Kerja*, Laporan penelitian DP3M-Dikti.
- , 1997 “dentifikasi terhadap Konflik Terbuka pada Masyarakat Nelayan di Desa Pasarbanggi – Rembang” artikel dalam *Majalah Penelitian Undip*. No. 15/IX/1997.

- , 1999/2000 *Pelabuhan Pekalongan: Dari Pelabuhan Umum Kecil menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara, 1900-1990*. Laporan penelitian dana Undip-McMaster Canada University.
- , 2000. “The Direction of Fishery Development in Indonesia, and Some Notes on Functional Change of Pekalongan Harbour from Public to Fishery Harbour, 1940-1980” artikel dalam *Journal of Coastal Development – Research Institute – Diponegoro University* (Volume 4, Number 1, October 2000, p. 25-33)
- , 2001 “Impor Ikan di Jawa, 1900-1940: Suatu Ironi dari Sumber Kekayaan Laut”, dalam Edy Sedyawati dan Susanto Zuhdi (Peny), *Arung Samudera: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapien*, Jakarta: Universitas Indonesia. (hlm. 243-269).
- , 2001. “Pekalongan Harbour: The Change from Trade Harbour, 1940-1990” makalah dipresentasikan pada *15th International Workshop on Southeast Asia Studies: Ports, Ships and Resources, Maritime History of Indonesia in the Age of Transition, 1870 until Present*. Leiden, 22-26 Januari.
- , 2000/2001. *Pelabuhan Pekalongan: Dari Pelabuhan Umum menjadi Pelabuhan Perikanan, 1900-1990* (Suatu Penelitian Pendahuluan), Laporan penelitian The Toyota Foundation desk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- , 2002. *Perkembangan Pelabuhan Pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan 1900-1990*. Universitas Indonesia, Jakarta (Disertasi).
- , 2003. “Pengembangan Pelabuhan Pekalongan”, makalah dipresentasikan dalam *Diskusi Nasional Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah*, diselenggarakan oleh Deputi Sejarah Nasional, di Bandung, 28-30 Juli.
- , 2005. *Ikan Layang Terbang Menjulung: Perkembangan Pelabuhan Pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan 1900-1990*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro dan The Toyota Foundation.
- , 2006. “ Kebijakan Ekonomi Berdikari dan Perkembangan Sektor Perikanan” makalah dipresentasikan pada *Konferensi Nasional Sejarah Ke VIII*, Jakarta 13-16 November.

Sumber tercetak dan Majalah

Gemah Ripah, 1968. No. 1-2 Th. IV: hlm. 15

Gemah Ripah, 1970, No. 9: 14-22.

Indisch Verslag, 1931: 285

Jaarsverslag van de Visschersvereniging “Mino-Sojo” te Wonokerta, District Wiradesa, Regentschap Pekalongan met Filialen over 1938.

Laporan Dinas Perikanan Laut Jawa Tengah, *Laporan Tahunan 1969*

Laporan Tahunan Departemen Maritim, 1967.

Lembaran Negara No. 82/1957 ttg Penghapusan Monopoli Garam

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1959 ttg pembatasan pedagang kecil/eceran yang bersifat asing yang berada di luar ibu kota Daswati I dan Daswati II, serta Keresidenan

Stadblad, Tahun 1941 No. 357 dan 388; 1924 No. 417, 1929 No.

Suara Merdeka, “Konflik Antarnelayan Sangat Memprihatinkan”, 25 Januari 2006, hlm. 26.

Suara Merdeka, “Pedagang Ikan dan Nelayan Mengeluh Omzet Turun”, 25 Januari 2006, hlm 17 dan 20.

Visserijnieuws, 1949 / No. 3.

Visserijnieuws, 1950 / No. 9, II. “Bibliografie Indonesische Visserij”.

Warta Ekonomi, 1957.”Penghapusan Monopoli Garam”, Th ke 10 No. 44/45, 9 November.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Jatidiri

Nama Lengkap : Prof. Dr. Sutejo Kuwat Widodo, M.Si.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 15 Mei 1960
Pekerjaan : Dosen Fakultas Sastra Universitas Diponegoro
Jabatan / Golongan : Guru Besar / Pembina Utama Muda IV/c.
Agama : Islam
Istri : Zulaechah, SH
Anak : 1. Sukmasari Nugraheni (Alm)
2. Nuzulul Widyadining Laras
(Siswa SMA N I Ungaran)
3. Sinta Pradananingrum
(Siswa SD N 01, 03, 06 Ungaran)
4. Ratih Jayanti
(Siswa SD N 01, 03, 6 Ungaran)
Alamat kantor : Fakultas Sastra Jl. Hayam Wuruk No. 4 Semarang.
Telp. 024. 8311444.
Kampus Tembalang 024. 7463144
Puskaj Sejarah dan Budaya Maritim Asteng –
Lembaga Penelitian UNDIP, Gedung Widyapura
Lantai II Tembalang. Telp. 024. 7460045
Alamat rumah : Jl. Parasamya IX/4 Ungaran - Kab. Semarang
Telp. 024. 6921934, HP. 081805820819
E-mail: sutejokw@yahoo.com

B. Pendidikan.

- SD Negeri Ngluwar 2 - Magelang, 1972.
- SMP Persatuan Ngluwar - Magelang, 1975.
- SMA Negeri 1 Sleman - Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, 1979.
- Universitas Diponegoro - Semarang, Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah (S1), 1984.
- Universitas Padjadjaran - Bandung, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial, BKU Sosiologi-Antropologi (S2), 1994.
- Universitas Indonesia - Jakarta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Ilmu Sejarah (S3), 2002.

C. Riwayat Pekerjaan.

- . Pengajar Tidak Tetap Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Undip 1984.
- . Pengajar/CPNS Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Undip 1-3-1985
- . Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Undip 1-9-1986 sampai sekarang

D. Organisasi

- . Ketua Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, Lembaga Penelitian Undip, 2005-2006.
- . Ketua I, Perhimpinan Pecinta Bandar Lama Pusaka Bangsa cabang Semarang, dari tahun 2005 sampai sekarang
- . Ketua Koperasi Fakultas Sastra Undip, 2005-2009

- . Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) Sastra, tahun 2006 sampai sekarang.
- . Ketua Pengembangan Kurikulum Fakultas Sastra, tahun 2006 sampai Sekarang
- . Sekretaris Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, mulai tahun 2007

E. Karya Tulis

1. *Pesantren dan Tuntutan Perubahan*, makalah 1986.
2. “Islam Pada Jaman Jepang: Suatu catatan kecil”, artikel dalam *Majalah Ilmu Sastra*, 1987.
3. *Desa-Kota dan Beberapa Teori Pembangunan*, makalah 1987.
4. “Teori Modernisasi dan Dependensia dalam Pembangunan di Dunia Ketiga”, artikel dalam *Majalah Prasasti*, 1987.
5. “Pemuda dari Masa ke Masa”, artikel dalam *Majalah Hayam Wuruk*, 1988.
6. “Peranan Pemuda Pada Masa Pendudukan Jepang”, makalah *Muker Sejarah*, 1989 di Bandung.
7. “Perubahan-Perubahan di Desa Ngablak – Pati Setelah 60 Tahun Penelitian D.H. Burger”, artikel dalam *Majalah Ilmu Sastra* 1991.
8. “Nelayan dan Lingkungannya”, artikel dalam *Majalah Ilmu Sastra* 1995.
9. “Teknologi dan Status Sosial ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Ujungbatu, Kabupaten Jepara”, artikel dalam *Majalah Penelitian – Undip*, 1995.
10. *Sejarah Ekonomi Nelayan di Jawa: Suatu konsep awal*, makalah, 1995.
11. *Kajian Awal Terhadap Perkembangan Perikanan Laut Bagansiapi-api Tahun 1940-1990: Suatu studi perkembangan center-pheriphery*, makalah, 1996.
12. “Teknologi dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Ujungbatu”, artikel dalam *Majalah Penelitian – Undip*, 1994.
13. *Teknologi dan Disparitas Sosial Masyarakat Nelayan*, makalah, 1994.
14. “Identifikasi Terhadap Konflik Terbuka Pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang: Kasus di Desa Pasarbanggi”, artikel dalam *Majalah Penelitian- Undip*, No. 15/IX/1997.
15. “Perkembangan Penduduk di Residensi Semarang”, artikel dalam *Majalah Citralekha*, No. 1/1997.
16. “Patron-Client pada Petani Jawa: Dilihat dari Teori Pertukaran “Homans””, artikel dalam *Majalah Citralekha*, No. 2/1997.
17. “The Direction of The Sea Fishery Sector Development and The Emerge of Pekalongan Fishery Harbour in 1940-1980” makalah dalam *The First International Conference on Indonesia Maritime History*, 1-4 Desember 1999 di Semarang.
18. “Ekologi Budaya: Materialisme Budaya”, artikel dalam *Majalah Kajian Sastra* No. 1/2000.
19. “Strukturis: Suatu Kajian Ringkas”, artikel dalam *Majalah Kajian Sastra* No. 2/2000.
20. “The Direction of Fishery Development in Indonesia and Some Notes of Functional Change of Pekalongan Harbour from Publict to Fishery Harbour, 1940-1980”, artikel dalam *Journal of Coastal Development*, Research Institute, Diponegoro University, Volume 4/2000.
21. “Pekalongan Harbor: The Change from Trade Harbor to Fishery Harbor, during 1940-1990”, makalah dalam *15th International Workshop on Southeast Asia Studies: Ports, ships and Resources: Maritime History of Indonesia in the Age of Transition, 1870 until Present*, 22-26 January 2001 in Leiden.
22. “Impor Ikan di Jawa, 1900-1940: Suatu Ironi dari Sumber Kekayaan Laut” dalam Edy Sedyawati dan Susanto Zuhdi (Peny), *Arung Samudera: Persembahan*

- Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian* (Jakarta, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2001). hlm 243-269.
23. “Menyikapi Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah di Era Reformasi” artikel dalam Jurnal *Citra Lekha*, Vol. VI, No. 1, 2003. ISSN: 1410-4938
 24. “The Change of Pekalongan Harbor: From A Trade to A Fishing Harbor, 1900-1990”, artikel dalam *Kajian Sastra* No.3 Th. XXVII, 2003 Terakreditasi No. 2/ DIKTI/Kep/2002.
 25. “Perkembangan Pelabuhan Pekalongan menjadi Pelabuhan Perikanan 1900-1990”, artikel dalam *Kajian Sastra* No. 3 Th. XXVIII, 2004 Terakreditasi No. 2/ DIKTI/Kep/2002
 26. “Interrelasi Peran Kelompok Kepentingan pada Masyarakat Nelayan Muncar di Ujung Timur Pulau Jawa”, artikel dalam Jurnal *Citra Lekha*, Vol. VII. No. 1, 2004 ISSN: 1410-4938.
 27. “Pengembangan Pelabuhan Pekalongan”, makalah dipresentasikan dalam *Diskusi Nasional Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah*, diselenggarakan oleh Asdep Sejarah Nasional, 28-30 Juli 2003.
 28. Sutejo K. Widodo, 2005. *Ikan Layang Terbang Menjulung: Perkembangan Pelabuhan Perikanan Pekalongan, 1900-1990*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro – The Toyota Foundation. (Buku)
 29. “Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Maritim: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Politik”, makalah dipresentasikan pada *Semiloka Nasional dan Kemah Riset Budaya Maritim* diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia Wilayah III, 9 Juni 2006.
 30. “Kebijakan Ekonomi Berdikari dan Perkembangan Sektor Perikanan”, makalah dipresentasikan pada *Konferensi Nasional Sejarah Ke VIII*, Asdep Sejarah Nasional, 13-16 November 2006.

F. Penelitian

1. Kesadaran Sejarah Untuk Masyarakat Berpendidikan Sederajar SLTA di Kodya Semarang. IDSN – Depdikbud, 1986. (Anggota).
2. Pertumbuhan Kampung Kota: Kasus di Kotamadya Semarang, Lembaga Penelitian Undip, 1989 (Ketua).
3. Profil Pesantren, Lembaga Penelitian Undip, 1989 (Ketua).
4. Prestasi Mahasiswa PMDK: Kasus Mahasiswa Fakultas Sastra, Lembaga Penelitian Undip, 1990. (Ketua)
5. Desa Ngablak Kabupaten Pati: Suatu perkembangan, Lembaga Penelitian Undip, 1990. (Ketua).
6. Oei Tiong Ham Concern: Raja Bisnis di Indonesi Awal Abad XX, Lembaga Penelitian Undip, 1991. (Ketua).
7. Pola Asuh Anak pada Wanita Pekerja, Petani dan Nelayan; Studi Kasus di Kotamadya Semarang, DPPM-Depdikbud, 1990. (Anggota).
8. Teknologi dan Disparitas Sosial: Studi terhadap Nelayan di Jepara, Lembaga Penelitian Undip, 1994. (Ketua).
9. Dampak Motorisasi Terhadap Hubungan Kerja, Sistem Bagi Hasil dan Orientasi Kerja, DP3M-Dikti, 1996. (Ketua).
10. Java Sea Region in Transition, c 1870-1970, Penelitian Hibah Bersaing Dikti dan The Toyota Founfation. Tahun I 1996/1997, Tahun II 1997/1998, Tahun III 1998/1999 (Anggota, bidang perikanan laut).

11. Pelabuhan Pekalongan: Dari Pelabuhan Kecil Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 1900-1990, Undip-McMaster Project 1999/2000. (Penelitian Mandiri).
12. Pelabuhan Pekalongan: Dari Pelabuhan Umum menjadi Pelabuhan Perikanan, 1900-1990, The Toyota Foundation desk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 2000/2001. (Penelitian Mandiri)
13. Pengembangan Obyek Wisata Bersejarah di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang, 2002 (Anggota).
14. Pola Perdagangan Kopra Makassar 1883-1958, Hibah Pekerti, 2004 (Anggota).
15. Sejarah Maritim Indonesia : Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak Jaman Prasejarah hingga Abad XVII), Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003 (Anggota).
16. Rekonstruksi Situs Galangan Kapal Lasem Untuk Pengembangan dan Promosi Paket Wisata Bahari di Rembang, Hibah Bersaing, 2005/2006 (Anggota)
17. Sejarah Maritim Indonesia : Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak Jaman Prasejarah hingga Abad XVII), Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005 .
18. Sejarah Maritim Indonesia : Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak Abad XVII sampai Awal Kemerdekaan), Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005.

G. Pengabdian Masyarakat.

1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kampung Kota di Kelurahan Genuksari Kotamadya Semarang, Lembaga Pengabdian Undip, 1990. (Ketua).
2. Dosen Pembimbing Lapangan KKN Undip 1987-1991.
3. Penataran DPL KKN di UGM Yogyakarta, 1988. (Peserta).
4. Seminar Pengembangan KKN Undip, 1988. (Pemakalah).
5. Pengembangan Tari Keprajuritan di Kawasan Wisata Kopeng, DP3M tahun 1994 (Anggota)
6. Pembinaan Wayang Orang di Desa Tutup Kabupaten Magelang, DP3M tahun 1995 (Anggota).
7. Pemberdayaan Usaha Bersama di Pemukti Gunungpati Kodia Semarang, DP3M tahun 1997. (Ketua).
8. Penyuluhan tentang Penulisan dan Pengajaran Sejarah untuk Pencerahan Bangsa di Era Keterbukaan, 2003, MGMP Sejarah Kodya Semarang. (Pemakalah)
9. Penyuluhan tentang Metode Penelitian Sejarah Lokal, 2004, MGMP Sejarah Kabupaten Kudus. (Pemakalah)
10. Penyuluhan Menggali Semangat Kebangsaan untuk Memperkokoh Integrasi Nasional, 2002, MGMP Sejarah Kodya Semarang. (Anggota)
11. Penyuluhan Ideologi Pancasila Mendukung Teguhnya Negara Kesatuan RI, 2002, MGMP Sejarah Kabupaten Grobogan. (Anggota)
12. Penyuluhan Relevansi Nilai-nilai Perjuangan R.A Kartini untuk Menumbuhkan Semangat Nasionalisme di Kalangan Pelajar, 2002, Siswa SMUN 1 Kabupaten Kendal. (Anggota)
13. Pelatihan Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Undip, 2003. (Pemakalah)
14. Lokakarya Pengajaran Sejarah Berbasis Kompetensi, 2005, MGMP Sejarah Kabupaten Brebes. (Anggota).

H. Peranserta Dalam Pertemuan Ilmiah.

1. Program Orientasi Akademik, Ilmu Sosial Pasca Sarjana UGM, 9 Febr – 30 Maret 1987. (Peserta).
2. Kursus Singkat Teori-teori Mutakhir Studi Pedesaan, Studi Sosial Pusat Antar Universitas, UGM, 10-31 Agustus 1987. (Peserta).
3. Kursus Singkat Penulisan Sejarah Lisan, 20 Nov. – 10 Desember 1988, oleh Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UGM. (Peserta).
4. Pelatihan Action Research, oleh LPTP-UNS-IDRC Pebruari-Oktober 1990 di Solo. (Peserta).
5. Seminar Hasil-hasil Penelitian di Lembaga Penelitian Undip, 14 1994. (Pemakalah).
6. Summer Course in Indonesian Modern Economic History, di UGM Yogyakarta, 3-29 Juli 1995. (Peserta).
7. Seminar Sejarah Ekonomi Indonesia, Di Fakultas Sastra UGM, 1996. (Pemakalah).
8. Pelatihan Bahasa Belanda Bagi Sejarawan, di Erasmus Jakarta, 13 Maret – 13 Juni 1997. (Peserta).
9. Seminar Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia di Universitas Indonesia 1997. (Peserta).
10. Seminar Nasional Hasil Vucer dan Penerapan IPTEK kepada Masyarakat, di Cisarua Bogor 1998. (Peserta Pemakalah).
11. Conference on International Assosiation of History of Asia, di Jakarta 1998. (Peserta).
12. Conference on The Moderns Economic History of Indonesia, di Yogyakarta 1999. (Peserta).
13. Lokakarya Hubungan Kelautan antara Indonesia dan Australia, di Bali 1999. (Peserta).
14. The First International Conference on Indonesia Maritime Histoty, di Semarang 1999. (Pemakalah).
15. 15th International Workshop on Shoutheast Asia Studies, di Leiden 2001. (Pemakalah).
16. Seminar Sejarah Indonesia “Menyikapi Pembelajaran Sejarah di Era Reformasi” oleh MGMP Sejarah Kabupaten Jepara, 2001. (Pemakalah).
17. Lokakarya Nama Fakultas Sastra UNDIP di Semarang, 2003 (Moderator).
18. Seminar Penelusuran Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah di Semarang, 2003 (Moderator).
19. Lokakarya Pengembangan Kurikulum dan Silabus Jurusan Sejarah FS Undip di Semarang, 2003 (Peserta).
20. Seminar Nasional “Struktur dan Agensi dalam Sejarah” di Jakarta, 2003 (Peserta).
21. Diskusi Nasional Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah, di Bandungan, 2003 (Pemakalah).
22. Workshop Penyusunan Bahan Ajar dan Inovasi Media Pengajaran di Semarang, 2004 (Peserta).
23. Lokakarya Hasil Penulisan Draft Pertama Sejarah Nasional di Yogyakarta, 2004 (Peserta).
24. Lokakarya Penyusunan Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat di Semarang, 2004 (Peserta).
25. Lokakarya Nama, Visi, dan Misi Fakultas Sastra UNDIP di Semarang, 2005 (Pemakalah).
26. Seminar Arsip Elektronik, di Semarang, 2005 (Moderator).

27. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) di UGM, 21-22 November 2005. (Peserta)
28. Pelatihan Audit Mutu Akademik (AMAI) di UGM, 23-25 November 2005. (Peserta)
29. Sosialisasi Pedoman Penulisan Sejarah Lokal, oleh Asdep Sejarah Nasional di Surakarta, 21-23 September 2005. (Peserta)
30. Seminar Regional Pelabuhan sebagai Landmark Sebuah Kota, oleh Pusdi Sejarah dan Budaya Maritim Asteng, DKP, dan Pelindo III, Desember 2005 (Panitia)
31. Seminar Nasional Pembudayaan *Spirit Intellectual Exercise* dalam Rangka Penjaminan Mutu, oleh Fak Sastra Undip, 18 Mei 2006. (Panitia)
32. Seminar Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, diselenggarakan oleh JICA, 26-27 Juni 2006. (Peserta)
33. Semiloka Persiapan Penerapan *Credit Transfer System* Universitas Diponegoro: Peluang, Hambatan, dan Pemecahannya. 30 Mei 2006. (Panitia)
34. Workshop Perubahan Lingkungan dalam Perspektif Sejarah, oleh Direktorat Geografi Sejarah di Yogyakarta, 20-23 September 2006. (Peserta)
35. Konferensi Nasional Sejarah Ke VIII di Jakarta 13-16, 2006 (Pemakalah)
36. Dialog Pariwisata Pantura Barat oleh DEPARI Jateng di Pemalang, 14 Desember 2006. (Moderator).

I. Penghargaan

1. Dosen Teladan III Tingkat Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Tahun 1988
2. Dosen Teladan II Tingkat Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Tahun 2005.

Semarang, 20 Pebruari 2007

Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si
NIP. 131458536